



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN
DIRJEN IKMA DAN DIRJEN INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	: ...
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 27 Juni 2022
Waktu	: Pukul 13.10 s.d. 16.25 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (F.P-Nasdem/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara	: 1. Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka untuk peningkatan daya saing khususnya industri makanan dan minuman, 2. Lain-lain
Hadir	: 36 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F.P-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Bambang Haryadi, S.E./F.P-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

7 orang anggota dari 11 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
5. Ismail Tomas, S.H, M.Si.
6. Ribka Tjiptaning Ploretariyati
7. Bambang Dwi Hartono

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H.M. Ridwan Hisyam
2. Drs. Mukhtarudin
3. Ir. Lamhot Sinaga
4. Bambang Hermanto, S.E.
5. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
6. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. R. Wulansari
3. Ramson Siagian
4. Katherine A. Oendoen
5. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. Rian Firmansyah, S.Pd.
2. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari S.E., M.M
3. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Zulfikar Hamonangan, S.H.
3. Rusda Mahmud
4. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. H. Rofik Hananto, S.E.
3. Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.
4. Dipl. Ing Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
3. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Dirjen Industri Kecil Menengah Aneka/IKMA (Reni Yanita)
2. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan/IMHLP (Emil Satria)
3. Direktur Industri Minuman, Hasil tembakau dan Bahan Penyegar/IMHTBP (Edy Sutopo)

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F.P-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kita mulai saja Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, meskipun ini hadir tadi langsung baru Mbak Wulan tetapi di *zoom* sudah hadir beberapa, total kita sudah hadir di *zoom* kurang lebih 16 anggota dan akan segera bergabung sedang makan siang di sebelah.

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI akan segera bergabung Pak Bambang Haryadi dan juga Pak Eddy Soeparno, sementara Pak Maman masih tugas ke luar negeri dan juga Pak Doni Oekon baru menyelesaikan karena baru Rakernas ya beliau kalau nggak salah.

Yang kami hormati juga Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun melalui *zoom meeting*.

Yang kami hormati Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka IKMA dan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian dengan segenap jajarannya.

Ini ada surat dari Pak Dirjen Industri Agro bahwa beliau jam 3 sore ini akan terbang ke Jepang, maka baru saja beliau hadir di sini dan menyampaikan permohonan maaf untuk tidak bisa hadir langsung. Atas itikad baiknya dengan mengajukan surat resmi bahkan hadir secara fisik, maka kita persilahkan nanti diwakili oleh direktur yang hari ini hadir begitu, ya.

Pertama-tama, pasti kita semuanya bersyukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Mahakuasa bahwa hari ini kita dikaruniai nikmat sehat *walafiat*, sehingga kita bisa hadir dalam forum rapat dengar pendapat kali ini dan dalam rangka menjalankan tugas kita masing-masing, dan sesuai dengan undangan pada hari ini kita akan melaksanakan Rapat Dengar

Pendapat dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, dengan agenda:

1. Penguatan industri kecil menengah dan aneka untuk peningkatan daya saing, khususnya industri makanan dan minuman.
2. Lain-lain.

Jadi kita fokus memang industri kecil dan menengah khususnya adalah industri kecil makanan dan minuman.

Dan berdasarkan dari data sekretariat bahwa Komisi VII DPR RI yang hadir berjumlah 18 anggota terdiri dari 7 fraksi, dengan demikian kuorum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan minta persetujuan anggota agar rapat dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah bisa disetujui Bapak/Ibu sekalian?

Baiklah, atas persetujuan anggota dan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.10 WIB)

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan Bapak/Ibu semua Anggota Komisi VII yang terhormat bahwa rapat ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam dan apabila dianggap perlu nanti bisa diperpanjang, setuju Bapak/Ibu sekalian ya?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi sektor industri adalah tingginya nilai impor bahan baku, kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman lebih dari 60% dari impor. Sekali lagi, jadi bahan baku industri makanan dan minuman lebih dari 60% berasal dari impor. Ketergantungan industri terhadap bahan baku impor dinilai cukup rawan terhadap daya saing dan keberlanjutan industri di dalam negeri.

Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor gula dan kembang gula dengan kode HS 17 pada bulan Mei 2020 naik hingga 106 juta dolar Amerika Serikat atau naik 38,2% dari bulan sebelumnya. Kemudian, kontribusi bahan baku susu segar dalam negeri terus menurun dan menyebabkan kenaikan bahan baku susu impor dari 75% di tahun 2017 menjadi 79% di tahun 2021.

Bapak/Ibu sekalian.

Kita memang mencatat bahwa situasi global sangat-sangat memprihatinkan dengan perang, di mana Rusia dan Ukraina juga salah satu pemasok disamping energi sudah barang tentu juga pangan. Sehingga terganggu rantai pasok *supply chain* dunia terhadap pangan dan itu berpengaruh terhadap sektor-sektor yang lain, yang utamanya gandum semula, lantas merembet juga ke masalah-masalah lain.

Bapak/Ibu sekalian.

Kami melihat peluang pengembangan industri makanan dan minuman nasional belum dimanfaatkan secara optimal, dengan berkurangnya keterkaitan hulu dan hilir di sektor industri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hari ini kami ingin mendalami terkait penguatan IKMA untuk peningkatan daya saing, khususnya industri makanan dan minuman.

Dan selanjutnya untuk efektifnya waktu kami persilahkan Dirjen IKMA dan direktur yang mewakili Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya.

Dipersilakan Dirjen IKMA Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dipersilakan yang terhormat.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VII DPR RI Pak Sugeng Suparwoto.

Yang hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir secara fisik hari ini, Ibu Wulansari, Bapak Rahmat Sinaga dan Bapak/Ibu yang hadir secara virtual.

Pertama-tama, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan program terkait dengan penguatan daya saing IKM, khususnya makanan-minuman. Jadi di sini Pak Ketua dan Bapak/Ibu, kami menyiapkan bahan paparan terkait dengan kegiatan kami dalam upaya peningkatan daya saing IKM yang kami lakukan melalui sentra IKM.

Jadi kalau berdasarkan data Bapak dan Ibu, lanjut ke *slide* 6. Jumlah IKM tercatat memang dari data tahun 2020 sebanyak 4,4 juta, sebagian besar atau hampir 40% merupakan IKM makanan minuman hampir 1,6 juta. Jadi kalau kita lihat persebarannya yang terbanyak ada di Jawa Tengah, peringkat pertama di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur ada 866.426 unit usaha, kemudian yang ketiga Jawa Barat, kemudian keempat Bali dan terakhir yang

kelima kalau kita boleh bilang 5 besar yang terakhir adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah unit usaha 146.994.

Nah, kalau kita lihat dari sentra Bapak dan Ibu, jadi kalau tadi secara peringkat unit usaha yang terbesar ada di Jawa Tengah, tetapi kalau di sentra ini yang terbesar sentranya adalah yang terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau dari pengertian sentra sebagaimana di PP 28 Tahun 2018 memang sentra ini kami mengelompokkan minimal 5 IKM dengan baku ataupun kegiatan proses produksi yang sejenis. Jadi secara persebaran sentranya yang terbanyak ada di Jawa Timur dengan jumlah sentra sebanyak 2.738 dan jumlah sentra pangannya tercatat 1.017. Untuk peringkat kedua, sentra ada yang paling banyak ada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah sentra 1.592 dan sentra pangannya sebanyak 652. Peringkat ketiga sentra ada di Jawa Barat, dengan jumlah sentra 1.465 dan sentra pangannya tercatat 717. Kemudian yang keempat, ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sentra pangan sebanyak 98, yang terakhir ada di NTB. Jadi kalau, kalau NTB ini sentranya 836 dengan sentra pangan 219. Inilah potret jumlah sentra IKM yang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua dengan sentra yang terbanyak memang ada di Jawa Timur Bapak dan Ibu.

Lanjut, terkait dengan sentra dan juga unit usaha ataupun IKM tersebut, kami melakukan program terkait dengan peningkatan daya saing IKM-nya. Terutama kami ingin mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di IKM sebagaimana di *slide* 5 tadi, jadi terhadap akses pembiayaan, kemudian akses sumber bahan baku dan juga bahan penolong terhadap teknologi dan juga sarana prasarana produksi. Kemudian, kami ingin menyelesaikan permasalahan terkait dengan kualitas produk dan keahlian SDM, kemudian yang terakhir peningkatan akses pasar. Jadi banyak kegiatan ataupun program yang dilakukan dalam upaya mengatasi persoalan yang ada di IKM ataupun di sentra, termasuk di dalamnya, kami melakukan kegiatan *link and match* untuk menjalin kemitraan antara IKM maupun dengan industri besarnya maupun IKM dengan sentra, ataupun IKM dengan sektor ekonomi lainnya.

Bapak dan Ibu.

Untuk mempercepat ataupun akselerasi peningkatan daya saing juga peningkatan penumbuhan wirausaha baru, kami juga melakukan kegiatan akselerasi dalam bentuk *awarding* ataupun *event-event* terkait dengan, kalau untuk pangan ada IFI, kemudian juga kalau untuk muslim ada IFCA dan seterusnya Bapak dan Ibu.

Lanjut, kami fokus untuk peningkatan daya saing melalui pengembangan sentra IKM, mungkin di sini kami tidak perlu memperjelas detailnya karena secara garis besar programnya sudah ada di *slide* 8 tadi, Bapak dan Ibu. Jadi di sini definisi sentra sebagaimana kami sampaikan di depan ini mengacu Pasal 1 PP 29 Tahun 2018, kemudian yang penting di sana adalah pengelola dari sentranya dan juga terkait dengan legalitas sentra IKM yang merupakan SK pengesahan sentra IKM dari kepala daerah, ini kami melihat dari komoditi sentra IKM-nya dan juga lokasi sentra IKM-nya. Jadi pengurus sentra IKM adalah perwakilan IKM yang ada di suatu sentra yang

bertugas mengurus para anggotanya, jadi ini mewakili aspirasi anggota di sentra tersebut, Bapak dan Ibu.

Lanjut, pola pengembangan IKM berbasis sentra kalau bisa kami sampaikan di sini. Jadi terhadap bahan baku, kemudian juga kegiatannya terkait dengan produktivitas dan juga akses pasar, termasuk di dalamnya juga ada logistik dan juga distribusi terhadap produk yang dihasilkan sentra tersebut kami mengembangkan peningkatan produktivitas IKM-nya melalui peningkatan kompetensi SDM, kemudian peningkatan kemampuan teknologi produksi, kemudian juga kualitas berdasarkan juga standar. Nah, jadi untuk akses IKM terhadap bahan baku ataupun bahan penolong, di sini pengelola sentra sudah menghitung kebutuhan, kemudian juga kualitas dan juga *timing*-nya ataupun waktu *delivery* dari bahan baku tersebut dibutuhkannya kapan. Nah, untuk itu dalam perjalanannya beberapa sentra juga sudah mengembangkan ataupun mengimplementasikan teknologi 4.0 dalam upaya lebih mengefisienkan kegiatan sentra tersebut dan juga peningkatan produktivitas dari sentra tersebut.

Lanjut, di sini ekosistem penguatan sentra IKM. Jadi di sini perlunya sinergitas pusat dalam hal ini kami, Ditjen IKMA, kemudian juga dengan para kepala dinas seluruh provinsi maupun kabupaten kota, kepala dinas yang membidangi perindustrian. Di sana ada ini kita ibaratkan memang ekosistemnya, jadi di dalamnya terdiri dari beberapa IKM kemudian bergabung menjadi sentra, kita ibaratkan seperti itu. Jadi memang bahan baku ataupun proses produksinya yang sama, jadi kita gabung di dalam sentra. Kemudian sentra tersebut juga harus dikelola ataupun ada kelembagaannya karena memang untuk menjamin suatu kegiatan usaha perlu adanya manajemen untuk pengelolaannya. Kemudian pengelolaan sentra ini merupakan manajemen aset Pemda, di mana didalamnya juga kami mencoba menghubungkan karena memang sesuai dengan amanat Undang-undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian terhadap IKM tersebut memang diharapkan IKM bisa menjadi rantai pasok ataupun penguatan struktur industri. Jadi IKM dapat mensuplai ataupun bagian *supply chain* dari suatu kegiatan industri besarnya.

Adapun hal-hal yang di belakang, yang selanjutnya adalah program yang dikembangkan Ditjen IKMA, baik itu bisa diberikan kepada IKM maupun ke sentra. Jadi ada program restrukturisasi mesin dan peralatan IKM ini terbuka, baik itu untuk IKM yang secara perseorangan ataupun dia tidak ada di dalam sentra, maupun IKM yang ada di sentra tersebut. Kemudian, kami juga mengembangkan program untuk implementasi *making* Indonesia 4.0 di lini produksi sentra IKM. Kemudian, ada juga fasilitasi pendampingan dan Sertifikasi Hazard ini terkait dengan komoditi pangan, memang Sertifikasi Hazard ini diperlukan untuk ekspor Bapak dan Ibu. Jadi kami melakukannya bisa untuk IKM-nya maupun IKM yang ada di sentra ketika memang IKM tersebut IKM pangan yang ada di sentra.

Lanjut, nah dalam upaya meningkatkan potensi sumber daya alam yang ada di kabupaten kota, kemudian juga dengan target Indonesia *spice up the world* sampai dengan tahun 2024. Kami juga melakukan peningkatan nilai

tambah dari bahan baku bumbu dan juga rempah menjadi suatu kegiatan industri, yang di dalamnya pasti dilakukan kegiatan pembinaan-pembinaan dan juga pendampingan, baik itu untuk memproses ataupun mengolah bahan baku menjadi suatu bumbu ataupun pendampingan-pendampingan dan bimbingan terkait dengan sertifikasi apa yang harus dipenuhi produk tersebut untuk tujuan ekspor. Jadi seperti itu karena kita target sampai dengan tahun 2024, ada terbangun 4.000 restoran di luar negeri. Nah untuk itu kita harus support dengan suplai bahan baku, suplai bumbu atau rempah untuk memperkenalkan beberapa *spicy* kita yang memang saat ini sudah sudah dikenal untuk lebih mengenalkan lagi.

Kemudian, kami juga mengembangkan pendekatan pengembangan potensi daerah di suatu wilayah untuk menghasilkan suatu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Ini kita kenal dengan program OVOP (*One Village One Product*). Jadi kita harapkan dengan satu kabupaten atau pun kota memiliki satu produk unggulan ini bisa mencapai kemandirian dan juga kreativitasnya. Jadi dalam pengembangan IKM OVOP tersebut juga dilakukan *market entry*, kemudian *rebranding* dan juga ekspansi Bapak dan Ibu. Jadi untuk mencapai produk yang memiliki keunikan khas berasal dari satu daerah pasti harus melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendampingannya, termasuk juga di dalamnya kegiatan untuk *rebranding* terhadap suatu produk tersebut.

Yang selanjutnya adalah program terkait dengan bagaimana kita untuk meningkatkan daya saing IKM dan juga sentra IKM berbasis pangan. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kemasan dari suatu produk pangan tersebut, sehingga pangannya tetap terjaga secara kualitas, kemudian juga bisa memperpanjang masa pakai ataupun *masa expired date*-nya untuk suatu produk pangan tersebut. Jadi kami sudah *launching platform* kemasan IKM, di sini bisa di akses semua dan di dalamnya sudah terbangun ekosistem yang melibatkan praktisi, pelaku usaha, kemudian juga akademisi, termasuk di dalamnya adalah unsur pemerintah *government* karena di dalamnya kita melakukan kegiatan yang namanya konsultasi dan bimbingan, termasuk di dalamnya ada *e-learning*, kemudian *e-directoring* pusat informasi dan juga bisnis *matching*, karena di dalamnya tidak hanya pelaku IKM pangan ataupun makanan-minuman, tetapi ada juga pelaku IKM dari sisi suplai bahan baku untuk kemasannya. Nah, di sini juga dikembangkan semua berbasis digital, semua pelaku, semua orang IKM maupun sentra bisa berkomunikasi dan juga langsung terhubung dengan yang memang pakarnya seperti itu.

Nah, terkait dengan IKM pangan juga kami untuk akselerasi, kami melakukan kegiatan yang namanya Indonesia *Food Innovation*. Jadi banyak produk IKM yang dihasilkan dari *event* ini juga sudah kami hubungkan dengan pihak lain, terutama ini yang sudah berhasil adalah dengan satu Grup Horeka Hotel. Jadi kami ingin hotel-hotel yang di Indonesia bisa menyajikan ataupun bisa menggunakan produk pangan lokal, ini juga kan kami sudah memulainya. Ini juga dalam satu program kemitraan, ke depannya memang ada beberapa hal yang harus kita selesaikan terkait dengan juga pembiayaan, ini juga perlu kita selesaikan karena banyak sekali produk potensial lokal kita yang bisa kita

gandengkan dengan faktor-faktor ekonomi lainnya, hotel, restoran dan juga industri besarnya Bapak/Ibu.

Lanjut, mungkin fokus ke gula rafinasi ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk kami sendiri yang di lampiran ya, ini kami menyampaikan lokus sentra binaan untuk di tahun 2022 ini antara lain ada di gula palma Pak, pendampingan keamanan pangan pada sentra gula palma ini memang tidak tidak membutuhkan gula rafinasi ya Pak karena memang kita ingin menjaga orisinalitas dari gula palma yang dihasilkan Indonesia karena sudah terkenal untuk ekspor, Pak.

Kemudian, ada pengembangan dari simplisia ataupun minuman herbal ini ada di Semarang Raya, kemudian juga untuk olahan ikan ada di Maluku dan Maluku Tengah dan juga di Tual. Kemudian ini moringa pengembangan produk olahan moringa ini ada di Sulteng, kemudian ada Porang juga Pak, untuk pengembangan produk olahan *chip*-nya dengan lokus di Jawa Timur dan juga NTT. Kemudian kalau untuk di Papua dan Papua Barat pengembangan produk turunan sagu, kemudian rempah dan bumbu, ini ada pengembangan sentra yang ada di Kabupaten Lampung Timur dan juga pengembangan sentra hortikultura di Jawa Barat. Yang terakhir adalah lokus sentra binaan kami untuk kopi ada di sentra kopi di Wonosobo, ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya, tahun kemarin. Kemudian ada juga pengembangan sentra kopi di Magelang dan juga pengembangan sentra kopi di Lampung.

Nah, terkait dengan gula rafinasi, memang mungkin nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Emil dan juga Pak Edi mengenai postur dari sisi *supply*-nya seperti apa karena kalau kita lihat memang kebutuhan gula kristal rafinasi di tahun 2021 boleh disampaikan memang tercatat hampir 3 sampai 3,2 juta ton, sementara produksinya hanya sekitar 2,13. Jadi ini belum terhitung kebutuhan untuk industri makanan-minuman begitu Pak, jadi kalau boleh disampaikan di sini kebutuhan untuk rumah tangga saja hanya sekitar 2,8 sampai dengan 3 juta ton. Kemudian, kebutuhan untuk industri makanan, minuman dan juga farmasi sekitar 3 sampai dengan 3,2 juta ton. Jadi kebutuhan hampir sekitar 5,8 tetapi produksi kita hanya 2,13, 2,2 seperti itu Pak. Jadi untuk apa namanya, untuk memotivasi adanya investasi terhadap pabrik gula memang beberapa bulan sebelum lahan kebunnya menghasilkan memang Kemenperin ada fasilitas, Permenperin 10 itu ya Pak ya untuk impor *raw sugar*, jadi untuk meningkatkan ini.

Nah sementara kalau penggunaan gula kristal rafinasi di IKM mamin dengan kuantitas tinggi pada beberapa sentra di sini akan kami sampaikan, disini ada untuk IKM dodol, IKM sirup, IKM bakpia, IKM olahan roti dan IKM olahan talas lainnya, Pak. Di sini ada kalau untuk IKM dodol utamanya IKM dodol Garut, gula yang digunakan adalah gula lokal bukan gula kristal rafinasi yang diproduksi di Lampung, ini karena pelaku ingin mendapatkan kualitas yang lebih baik dengan menggunakan gula lokal, seperti itu.

Kemudian, kami juga menyampaikan data terkait dengan rekap sentra IKM pangan Pak, mulai dari Aceh sebagaimana yang kami sampaikan di dalam gambar tadi, ada datanya, jadi kami siap dengan data untuk sentra IKM pangan

yang memerlukan gula rafinasi. Jadi secara jumlah unit usaha ada sekitar 155.605 dengan jumlah sentranya 4.107.

Mungkin itu Pak Pimpinan paparan dari IKMA.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F.P-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi tadi kebetulan perlu disampaikan anggota yang terhormat bahwa Dirjen Agro, mohon izin karena jam 3 harus terbang mendampingi menteri ke Jepang, tadi beliau hadir di sini jadi tidak sempat mengikuti ini karena juga dengan niat baik mengirimkan surat tertulis, maka kita izinkan, jadi diwakili oleh direktur. Dipersilakan Pak Direktur untuk menyampaikan hal-hal menyangkut tentang Agro.

Mungkin sebelum masuk itu, ada sekedar gambaran umum ya betapa ini penting sekali ya industri kecil menengah. Kita sama-sama tahu menjadi *buffer zone* ekonomi kita dan diperkirakan ini gambaran dunia kok suram semua gitu ya, resesi dunia akan segera mengancam. Maka kita akan perkuat industri-industri kecil, menengah sebagaimana pengalaman empirik kita beberapa waktu lalu yang menjadi penyelamat ekonomi kita adalah industri kecil, menengah dan itu jumlahnya juga hampir mencakup 90% dari pelaku industri kita. Bahkan tenaga kerjanya pun demikian mencakup 94% lebih. Saya kira ini menjadi penting kita semuanya, orang Jawa bilang *cancut taliwondo* menghadapi masalah-masalah yang akan segera melanda ini, ini memang 'Joko Sembung nabrak tembok agak nyambung kok'. Jadi kita menyiapkan segala sesuatunya kalau bahasa umumnya mitigasi, memitigasi apa yang akan terjadi terjadi. Jadi inflasi Amerika dalam sejarah 40 tahun terakhir tembus 8,4% tertinggi, Eropa juga tertinggi segera akan terjadi stagflasi dan sebagainya, sebagainya. Maka dalam materi kita harus kuat sebagaimana pengalaman selama ini industri kecil, menengah menjadi *buffer zone* penguat dari ekonomi kita.

Dipersilakan yang terhormat Pak Direktur dari Agro.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi VII.
Yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat, Pak Sugeng Prawoto.
Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Bapak, didampingi oleh Pak Edi Sutopo dari Direktorat Industri Minuman, Tanaman Tembakau dan Bahan Penyegar akan mencoba menyampaikan terkait dengan penguatan industri kecil menengah dan aneka untuk peningkatan daya saing, khususnya industri makanan dan minuman.

Secara umum bahwa dapat kami sampaikan Bapak/Ibu sekalian, bahwa industri makanan dan minuman merupakan sektor industri di bawah binaan Ditjen Industri Agro yang menghasilkan produk, yang sebagian besar untuk konsumsi masyarakat dan sebagai bahan baku untuk industri menengah dan industri kecil. Industri makanan dan minuman mempunyai peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, industri makanan dan minuman juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, serta industri makanan dan minuman berperan dalam mendukung pemenuhan bahan baku untuk pertumbuhan dan perkembangan industri kecil, menengah dan UKM.

Kita lihat selanjutnya adalah kinerja industri makanan dan minuman terlihat bahwa pada periode di 2016-2019 memang PDB, pertumbuhan PDB industri mamin itu selalu di atas PDB Industri Agro dan nasional. Dan industri makanan minuman ini pada kondisi yang 2021 dan 2022 kemarin memang terjadi penurunan yang cukup besar sekali Bapak, pertumbuhan PDB-nya.

Selanjutnya mungkin peran sektor industri Agro pada triwulan 1 tahun 2022 bahwa peran industri Agro itu di dalam PDB sektor industri pengolahan nonmigas perannya adalah 50,26% industri agro. Nah dari 50,26% ini, industri makanan dan minuman menempati urutan pertama sebesar 37,77% disusul oleh industri pengolahan tembakau 4,57%, industri kertas dan barang dari kertas percetakan, reproduksi, media rekam dengan posisi 3,84%, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari rotan dan sejenisnya 2,68% dan industri *furniture* 1,41%.

Nah kalau kita lihat terhadap PDB nasional bahwa industri agro ini menyumbang tidak kurang dari 8,72% untuk terdiri dari KBLI 12,79% itu industri pengolahan tembakau, KBLI 17 dan 18 industri kertas dan percetakan 0,67%, KBLI 16 industri kayu 0,46% dan KBLI 31, industri *furniture* 0,24% serta KBLI 10 dan 11 sebesar 6,55%.

Bapak/Ibu sekalian.

Kalau kita lihat neraca industri, nilai neraca industri makanan dan minuman pada triwulan 1 tahun 2022 ini bahwa ekspor kita masih cukup tinggi 44,828 juta US dolar dengan impor 13,340 juta US dolar dan neraca kita masih di 31 ribu juta US dolar atau 31 miliar US dolar. Mungkin bisa kami sampaikan, selanjutnya industri pada bab 3, industri penunjang dalam rangka penguatan industri kecil, menengah dan aneka ini kami sampaikan industri gula. Salah satu faktor penentu peningkatan daya saing industri makanan dan minuman adalah pemenuhan bahan baku dan atau bahan penolong.

Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perindustrian bahwa Kementerian Perindustrian memiliki kewenangan untuk menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan industri dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, salah satu pemenuhan bahan baku industri makanan dan minuman adalah gula yaitu gula kristal rafinasi, yang saat ini penyalurannya diatur oleh regulasi karena tidak boleh *reimburse* untuk kebutuhan langsung dikonsumsi oleh masyarakat.

Bapak/Ibu sekalian.

Kami sampaikan kondisi pergulaan nasional bahwa gulanya merupakan salah satu komoditas kebutuhan pokok yang kebutuhannya semakin hari semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan industri. Jadi jenis-jenis gula yang ada di Indonesia, meliputi:

1. Bahan baku, gula bahan baku atau kita kenal dengan gula kristal mentah atau *raw sugar*.
2. Gula produk, ini ada 2 macam ada gula kristal putih DKP. DKP ini adalah gula yang digunakan untuk konsumsi langsung masyarakat dan dapat dijual secara eceran. Yang kedua adalah gula kristal rafinasi, gula jenis ini adalah gula yang digunakan sebagai bahan baku industri, hanya boleh dijual kepada industri pengguna antara lain industri makanan, minuman dan farmasi.

Jumlah pabrik gula yang ada saat ini meliputi PG yang mengolah tebu menjadi GKP untuk pemenuhan konsumsi langsung itu ada 43 PG milik BUMN, dengan kapasitas 163.000 TCD dan 19 PG milik swasta yang mengolah gula tebu menjadi gula kristal putih dengan kapasitas 153.000 TCD. Yang kedua adalah PG yang mengolah *raw sugar* menjadi GKR untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri makanan, minuman dan farmasi terdiri dari 11 pabrik gula rafinasi dengan kapasitas 5,016 juta ton.

Bapak/Ibu sekalian.

Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen juga bahwa komunitas gula kita ini perkiraan kebutuhan gula nasional kita 5,8 sampai 6,2 juta ton dan terdiri dari untuk kebutuhan rumah tangga itu lebih kurang 2,8 sampai 3 juta ton dan industri gula kristal rafinasi untuk kebutuhan industri maminfar itu lebih kurang 3 sampai 3,2 juta ton dan kebutuhan industri kecil dan menengah dengan hitungan kami 400-500 ribu ton. Pada saat ini bahwa produksi gula nasional kita di gula tebu itu ada 43 PG BUMN dan 19 PG swasta, dengan produksinya lebih kurang 2,2 juta ton. Nah, pemenuhannya adalah pemenuhan dari GKR 3,3 sampai 3,2 juta ton oleh 11 PG GKR dan pemenuhan oleh GKP sebesar 0,7 sampai 0,9 juta ton oleh PG GKP dengan 13 PG tebu. Ini sesuai dengan Permenperin Nomor 10 Tahun 2017.

Bapak/Ibu sekalian.

Kami sampaikan juga bahwa Perpres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas dari Badan Pangan Nasional ini melaksanakan tugas di bidang pangan. Jenis pangan tugas dan fungsi BPN adalah beras, jagung, kedelai dan gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai. Bila ditambahkan dengan produk minyak goreng dan tepung terigu menjadi 11 komoditas Bapokting.

Sesuai dengan amanah PP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagai peraturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 bahwa Kementerian Perindustrian mempunyai kewenangan dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang selanjutnya ditetapkan melalui neraca komoditas.

Kepmenperin 10 Tahun 2017 tentang fasilitas memperoleh bahan baku dalam pemenuhan gula, pembangunan industri gula baru dan perluasan. Pemerintah memberikan insentif kepada investor berupa bahan baku *raw sugar* impor untuk memenuhi kapasitas produksi gula baru. Hal ini tentu akan meringankan *cash flow* dari industri dalam membangun perkebunan tebu dan mendorong minat investor untuk melakukan investasi di bidang industri gula yang terintegrasi dalam pembangunan perkebunan tebu.

Alokasi pemberian insentif *raw sugar* untuk industri gula baru ini dihitung dari defisit neraca gula konsumsi nasional hingga pemberian insentif ini juga berdampak pada stabilitasi harga gula nasional. Nah, ini kalau Bapak/Ibu sekalian bisa kami sampaikan sedikit bahwa proses bisnis dari sistem neraca komoditas yang tadi kami sampaikan di awal bahwa gula ini pemenuhannya untuk impornya melalui sistem neraca komoditas, pelaku usaha dalam hal ini nantinya akan mengusulkan untuk kebutuhan tahun depan. Jadi di bulan Juni-Juli ini kami Bapak sudah sudah dibuka untuk Sinas NK ini untuk menerima usulan dari pelaku usaha. Kami dari kementerian teknis nanti ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian ini selaku KL teknis akan memverifikasi usulan kebutuhan tersebut dan selanjutnya akan kami tetapkan akan kompilasi dalam Sinas NK dan pada rapat-rapat di Kemenko Perekonomian akan ditetapkan besaran dari kebutuhan tahun 2023 dalam hal ini. Sehingga pelaku usaha dapat mengajukan rekomendasi untuk kepada ...*(suara tidak jelas)*... perizinan terkait dengan PI dan ...*(suara tidak jelas)*... nya. Itu mungkin selintas mengenai proses bisnis dari sistem neraca komoditas nasional.

Bapak/Ibu sekalian.

Tata niaga impor gula ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kita ketahui bahwa impor gula kristal mentah atau *raw sugar* ini dapat dilakukan oleh pemilik APP untuk keperluan GKM diolah menjadi GKR dalam negeri, GKM diolah menjadi GKP. GKM sebagai bahan baku industri di dalam negeri dan GKM sebagai bahan baku industri di kawasan KITE dan KB. Yang kelima adalah GKR sebagai bahan baku industri untuk kawasan KITE dan KB serta GKR sebagai bahan baku industri di kawasan KITE dan KB.

Selanjutnya adalah pengaturan penyaluran perdagangan gula kristal rafinasi ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi. Jadi perusahaan GKR itu hanya bisa menyalurkan gulanya itu untuk industri pengguna langsung atau kita kenal dengan *b to b* yang diatur pada Pasal 2, "Gula kristal rafinasi hanya dapat diperdagangkan oleh produsen gula kristal rafinasi kepada industri pengguna sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi".

Yang kedua adalah untuk koperasi atau IKM, di atur di dalam Pasal 5 ayat (2) "Dalam hal pemenuhan kebutuhan industri menggunakan, pengguna skala mikro, kecil dan menengah produsen gula kristal rafinasi dapat menjual gula kristal melalui distributor yang berbadan usaha koperasi".

Ini Bapak/Ibu sekalian, kami sampaikan juga skema permohonan penyaluran GKR melalui koperasi. Tentu ada pada koperasi akan mengajukan permohonan pemenuhan GKR-nya dilengkapi dengan daftar Anggota UKM-nya, kapasitas produksi dan kebutuhan GKR-nya, disampaikan kepada Dinas UKM setempat dan pada dinas akan dilakukan verifikasi dan akan disampaikan juga ke Kementerian Koperasi dan UKM, juga akan dilakukan verifikasi terhadap Anggota UMKM tersebut dan diusulkan kepada Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan surat pemenuhan kebutuhan GKR melalui koperasi yang dimohonkan kepada Agri. Agri nanti akan menerbitkan surat pemberitahuan penyaluran GKR melalui koperasi, pemohon kepada seluruh Anggota Agri dan Anggota Agri akan menyalurkan GKR melalui koperasi pemohon. Itu kira-kira skema permohonan penyaluran GKR yang melalui koperasi yang ada saat ini.

Untuk penguatan kepada IKM tadi, kami dari Direktorat Jenderal Industri Agro mengusulkan usulan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022 yaitu memberikan peran kepada IKM Center sebagai lembaga penyedia bahan baku gula kristal rafinasi kepada industri kecil dan menengah khususnya yang tidak menjadi anggota koperasi.

Yang kedua adalah IKM center wajib memiliki data anggota UMKM binaannya, berupa nama UMKM, izin usaha, kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku GKR-nya. Yang ketiga, IKM center wajib menyampaikan laporan distribusi GKR kepada Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian. Yang keempat, IKM center wajib melakukan pengawasan distribusi GKR agar memiliki data ketelusuran penyaluran GKR untuk menghindari terjadinya rembesan GKR.

Mungkin itu Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F.P-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi apa yang dipaparkan kita mencatat bahwa kita memang impor gula kurang lebih hampir 3 juta ton ya dari 5,8 kebutuhan produksi dalam negeri, kurang lebih hanya 2,2 juta ton saja, maka kita perlu impor kurang lebih 3,5 juta ton lah kurang lebih setiap tahun. Dan *raw sugar* rafinasi dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan industri makanan-minuman, tapi kalau kita lihat apa yang dipaparkan irisan industri kecil menengah kurang lebih butuh 400 sampai 500 ribu ton per tahun yang itu ada mungkin sekarang belum mendapat insentif ya di situ, belum mendapat jatah dari jumlah impor tadi ya kalau tidak salah. Sehingga diperlukan skema-skema baru di mana peran-peran koperasi melalui koperasi untuk bisa menyalurkan gula rafinasi untuk kepentingan industri kecil, menengah makanan minuman.

Saya kira itu apa yang dipaparkan dan memang maksud juga rapat kali ini adalah sekali lagi kita ingin memastikan bahwa industri kecil, menengah makanan minuman ini juga mendapat perhatian dari kita mengingat peran yang strategis, sehingga kedepan sekali lagi kalau terjadi krisis besar maka kita punya daya tahan atau imunitas di tingkat industri kecil menengah makanan minuman yang lebih handal.

Saya kira itu Bapak/Ibu sekalian, mari kita cermati, kita dalam apa yang telah disampaikan oleh baik Dirjen IKMA maupun Ditjen Industri Agro yang tadi diwakili oleh Bapak Direktornya.

Dipersilakan dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, dipersilakan Pak Bambang DH yang terhormat.

F-PDIP (BAMBANG DWI HARTONO):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VII, Mitra kerja yang sangat saya hormati.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tapi rasanya bersifat umum, yang pertama banyak produk industri kita masih tergantung dengan bahan baku impor. Kemarin kita berkunjung ke Pabrik Gudang Garam mereka juga menyampaikan soal faktor ketergantungan bahan baku ini. Pertanyaannya, adakah upaya nyata untuk terus mengurangi ketergantungan kita pada bahan baku, kalau memang bahan baku bisa disiapkan di dalam negeri kenapa harus terus-menerus tergantung.

Di dalam penyajian kadang-kadang data bahan baku impor itu hanya 1 tahun, jadi kita kurang melihat dari waktu ke waktu dan rentang waktu begitu sehingga kita tidak bisa tahu naik turunnya. Kalau data itu ada dan tentu kita

mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku, kita tidak bicara hanya tembakau, rokok, gula dan sebagainya.

Yang kedua, IKM itu biasanya *handy cap*-nya 3, akses mudah, akses pasar, manajemen. Jadi, kita mendorong supaya pemerintah serius untuk intervensi di paling tidak 3 hal itu, dulu pernah ada *statement* terkait dengan akses modal misalnya di *release*-lah KUR ya, kredit untuk rakyat. Bagus *statement*-nya, bagus *policy*-nya tapi prakteknya sulit, jadi dicek aja ke perbankan apakah mampu menyalurkan KUR karena nampaknya di perbankan juga di daerah nggak mau ambil resiko, itu probelmnya. Kemudian termasuk manajemen pembinaan pada pelaku usaha kecil dan menengah terkait dengan tadi yang sudah sampaikan Dirjen IKMA, bagus itu.

Kemudian gula, gula itu salah satu kebutuhan pokok ada nggak upaya serius pemerintah untuk terus meningkatkan rendemen, kalau pabrik-pabrik gula lama ini kan problemnya di mesin. Ada nggak misalnya kebijakan untuk permesinan, lalu kita sering di media melihat data-data dari kementerian maupun persatuan petani tebu ini sering gesekan, mana yang benar termasuk persoalan rendemen. Sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan petani tebu yang pada akhirnya menimbulkan gejolak, mudah-mudahan ke depan ini bisa makin kita tekan terus.

Saya rasa itu Pak Ketua, tiga hal yang perlu mendapat atensi menurut saya, supaya betul-betul ini secara makro kita ada *policy* lebih jelas Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F.P-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Bambang DH yang terhormat.

Dilanjutkan Fraksi Partai Golkar, tadi ada Pak Lamhot tapi kalau belum, oh *virtual* dipersilakan yang terhormat Ibu Roro, kenapa *virtual* Bu Roro? Syukurlah kalau udah pulih.

F-PG (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pak Sugeng, Pak Bambang dan juga yang barusan hadir dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya banggakan.

Dan terima kasih para mitra kerja kami IKMA dan juga Industri Agro Kemenperin atas pemaparan yang telah disampaikan kepada kami.

Saya ada sedikit pertanyaan, jadi yang pertama mengenai gula seperti yang tadi sudah disampaikan di *slide* nomor 9 dari Dirjen Industri Agro paparannya, kami mengetahui bahwa pada dasarnya kebutuhan konsumsi gula nasional kita terkhusus di sektor rumah tangga itu sebesar 5,8 hingga 6 juta ton. Sedangkan produksi gula kita dalam negeri mohon maaf itu hanya mampu mencapai di kisaran 2,1 juta ton. Nah, maka oleh karena itu memang saat ini kita mengalami defisit dan kebutuhan dalam negeri tentu dipenuhi oleh impor. Jadi saya mengetahui ternyata ya impor kita itu dari Thailand, India dan juga Australia maka saya ingin menanyakan ke depannya gitu ya. Bagaimana strategi pemerintah terkhusus untuk meningkatkan produksi gula kita, apakah selama-lamanya kita harus *dependent* terhadap impor dari negara-negara tertentu. Lalu kemudian bagaimana, mungkin itu yang pertama.

Lalu kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan mengenai IKM. Jadi sentra IKM tadi ternyata mayoritas itu ada di Jawa Timur ya, itu juga hal yang baru buat saya informasinya. Saya ingin menanyakan bagaimana kondisi ataupun status sentra IKM di wilayah Indonesia Timur, apakah selama ini *evently distributed* di seluruh nusantara gitu. Saya sih berharap tidak tersentral hanya di Pulau Jawa saja, tapi pulau-pulau lainnya juga akan memiliki sentra IKM tersebut.

Lalu yang terakhir berkaitan dengan daerah pemilihan saya di kabupaten Gresik dan Lamongan, mewakili masyarakat di Jawa Timur juga. Saya ingin menanyakan karena salah satu permasalahan terbesar kami di daerah adalah kesulitan bagi IKM untuk melakukan penetrasi ke pasarnya gitu. Jadi apa namanya baik itu dari segi teknologinya, teknologi produksi, lalu kemudian pasarnya gitu hingga ke pasar, jadi pemasaran mohon maaf. Maka apakah ada mungkin program gitu ya, dari Kementerian Perindustrian, kalau kemarin sih kami sudah merealisasikan salah satu program dari Kemenperin terkhusus untuk pengembangan IKM-nya tapi lebih ke apa namanya bimbingan teknis ya kepada masyarakat dan itu sangat amat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, maka sekarang saya ingin menanyakan gitu, apakah ada bimbingan terkhusus, lebih terfokuskan kepada pemasaran gitu. Jadi pemasaran hingga ke konsumennya, ini kan tentunya membutuhkan sebuah *skill* yang berbeda begitu, mohon nanti bisa disampaikan kepada kami program-program inti yang selama ini juga sudah dilakukan, lalu kemudian bisa kita kerjasamakan ke depannya.

Sekian dari saya, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Izin Bu Dirjen saya melanjutkan karena ketua, rapat fraksi, jadi intinya begini Bu Dirjen. Jadi kami ini semua di daerah pemilihan tuh pasti ada namanya industri kecil dan semangat pemerintah untuk memperkuat industri

kecil dan itu harus kita dukung. Namun apa daya, ada sisi lain industri kecil ini tidak mungkin bisa bersaing dengan industri besar.

Jadi kami melihat bahwa industri khususnya ini gula ya karena bagaimanapun kita melihat misalnya ya ada industri sekarang ini banyak kayak *franchise* kecil tuh apa namanya Boba, kan itu industri kecil banyak banget gitu. Namun dia harus mendapatkan gula, gulanya gula konsumsi gula umum kan, nah kan ini nggak *fair*, dimana asas keadilan bagi satu sisi pemerintah ingin memperkuat daya saing industri kecil, menambah fungsi industri kecil semakin merata tapi sisi lain kita tidak bisa memberikan satu fasilitas.

Nah, ini kami sempat ditanya oleh industri-industri kecil nih, Pak kami harus beli harga gula yang tinggi sedangkan industri besar kaya maaf nih Coca-Cola, dia punya fasilitas dapat fasilitas gula rafinasi yang jelas harganya disparitasnya jauh dengan harga gula kristal putih GKP. Kenapa ini tidak diberikan kepada industri kecil ini, apakah industri kecil ini bukan bagian dari industri, kalau kita melihat asas keadilan ini sangat tidak adil.

Maka itu, saya ini atas nama Komisi VII kita pengin merumuskan bagaimana industri-industri kecil ini juga dibantu, Bu. Jadi di dapil saya contohnya ada ini ibu-ibu, pangsanya jelas dia bekerja sama dengan pemda untuk makanan-makanan di pemda tapi dia tetap tidak bisa, minyak goreng mahal, ditambah ini dia kebetulan jualan nastar, kue-kue gitu kan tapi mereka mengeluhkan harga gula, kan itu harga gula.

Nah intinya itu, jadi kita ingin merumuskan satu apa ya, kita mau mencari jalan keluar bagaimana pemerintah juga bisa melihat atau memfokuskan terhadap penguatan industri kecil ini. Bahkan kita juga sempat singgung juga terkait masalah rentan kebocoran, saya bilang kita pemerintah juga sudah menyiapkan kok, kita kan melihat bahwa ada beras subsidi aja banyak yang ditangkep kan, diselewengkan karena ada Satgas, kenapa kita nggak bernaung di Satgas Pangan gitu untuk menguatkan ini.

Mungkin itu dari saya, selanjutnya prolog sedikit Bang karena melanjutkan. Tapi poinnya itu, poinnya bahwa Komisi VII, keberadaan Komisi VII yang menjadi mitra Kementerian Perindustrian ini. Kementerian Perindustrian ini jangan hanya membina industri besar, kita ini industri kecil juga harus kita perhatikan. Jadi semangat untuk berdiri diatas kaki kita sendiri itu akan apa terwujud Pak tapi kalau Kemenperin sendiri hanya fokusnya ke industri besar kayak industri makanan-minuman, saya kasih contoh misalnya kayak Khong Guan, Coca Cola itu semua dapat fasilitas gula yang murah ini kenapa giliran saudara-saudara kita yang berusaha yang masih disebut IKM itu tidak mendapat fasilitas gitu loh, kan mereka juga sama punya hak yang sama, punya hak untuk meraih keuntungan. Nah, itu dari saya sedikit.

Selanjutnya Bapak Lamhot dari Fraksi Perindustrian.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Saya tadi sebenarnya mau menyampaikan apa yang dibilang Pak Bambang, cuma karena saya sudah dipersilahkan terpaksa harus ngomong walaupun semua udah di *cover* tadi oleh Pak Bambang.

Baik, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi VII yang saya hormati.
Bapak/Ibu Anggota, Bu Dirjen IKMA, Dirjen Agro atau yang mewakili dan seluruh jajaran.

Pertama itulah hebatnya Komisi VII ini, mulai dari industri kecil sampai industri pertambangan raksasa di urusin di ruangan ini. Jadi hajat hidup orang banyak di Republik ini, mulai dari yang terkecil sampai raksasa itu diurus oleh Pak Bambang ya, beruntunglah negara ini punya Komisi VII kira-kira begitu ya karena baru kemarin bicara Pale yang besar-besar, Freeport, tiba-tiba sekarang bicara industri kecil gitu.

Saya ingin mengatakan Bu Dirjen begini, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa di saat resesi ekonomi dunia saat ini kita butuh sebuah *buffer zone* ya. Kita tahu di saat krisis kemarin penyumbang terbesar dari PDB kita 57% tuh disumbang oleh IKM dan UMKM. Mereka ternyata di masa krisis ekonomi ini memang merekalah yang paling tahan banting, paling kuat gitu padahal kalau kita sadari sebenarnya apa yang kita berikan terhadap mereka sesungguhnya belum maksimal gitu ya, tapi toh mereka bisa *survive* bahkan menjadi kontributor terbesar 57% PDB kita disumbang oleh sektor IKM dan UMKM ini. Apalagi kalau kemudian kita bisa memberikan perhatian khusus terhadap sektor IKM ini, saya rasa mungkin bukan 57% lagi kontributor mereka terhadap PDB bisa lebih misalnya.

Kita tahu juga misalnya seperti China, bagaimana industri rumah di sana itu tumbuh pesat sehingga ekonomi mereka sangat kuat fundamentalnya, di bawah mereka sangat kuat, itulah yang kita dorong. Nah, pada hari ini kita mitra Komisi VII itu adalah salah satunya IKM, ini juga harus kita mengoptimalkan dalam rangka memperkuat fundamental ekonomi kita.

Saya ingin memberikan masukan selain nanti yang ke dua saya akan sampaikan seperti yang dibilang Pak Bambang soal bagaimana terhadap makanan-minuman gula rafinasi dan lain sebagainya, tapi saya yang pertama saya mau masuk ke makronya dulu. Pertama begini, kalau kita evaluasi Bu Dirjen tahun-tahun lalu sentra IKM yang dilakukan itu banyak yang ini, banyak yang bahwa kabupaten atau kabupaten kota tertentu sentra IKM-nya yang disetujui oleh Perindustrian, itu banyak yang memang di daerah itu bukan unggulannya. Ini bukan kesalahan Perindustrian, tapi si kabupaten itu yang penting gue ajuin deh, gua masukin aja, gua dapat PAD ya syukur kira-kira begitu gitu.

Contoh misalnya di kabupaten A misalnya kuatnya dia adalah sentra IKM kopi misalnya, tapi yang diajukan adalah seperti di daerah saya. Saya pernah protes juga Bu Dirjen, yang kuat di daerah itu sebenarnya sentra ulos tapi dia ngajuinnya bukan itu, yang diajukan adalah sentra kopi begitu. Sebaliknya di sini kuatnya kopi seperti di kami, dapil saya Humbang Hasundutan kopi, kopi Lintong kalo pernah denger ya yang *market*-nya di dunia internasional sangat bagus. Justru di sentra IKM di Humbang Hasundutan belum pernah sentra kopi misalnya gitu, ke balik-balik.

Nah, makanya saran saya masukan saya ke depan, tolong bisa nggak kabupaten kota 517 kabupaten kota seluruh Indonesia itu kita inventarisir dulu atau kita *list* dulu kabupaten ini kuatnya di mana, sentra IKM apa yang dibutuhkan di kabupaten kota ini. Sehingga dengan demikian ketika mereka mengusulkan, Kemenperin melalui Dirjen IKMA mengatakan “Eh anda nggak kuat di sini, anda kuatnya di sini”, jadi *list*-nya sudah ada, paling tidak portofolio IKM-nya itu sudah dikeluarkan oleh Kemenperin gitu, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang gitu kan. Sehingga nanti dalam rangka implementasinya itu akan memudahkan mereka, misalnya kita kasih beberapa pilihan bahwa kabupaten ini yang cocok sentra IKM-nya adalah a, b, c, d dan seterusnya, kurang lebih inventarisir seperti itu untuk memudahkan kabupaten kota. Jangan sampai nanti di kabupaten itu sentra itu setelah dilaksanakan nggak jalan Pak Tifatul, setelah anggarannya terserap akhirnya nggak jalan, banyak beberapa daerah. Yang salah siapa? Memang kabupaten kotanya apalagi Kadis Perindag-nya itu, betul ya Bu Dirjen ya, banyak yang kasus seperti kasus seperti itu. Yang penting anggarannya terserap dulu nanti soal jalan apa *nggak* ini soal lain, pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah bukan lagi posisi kita untuk memberikan penguatan terhadap IKM itu sendiri.

Nah, ini yang harus kita coba cermati evaluasi kita masukan kita terhadap IKM di tahun-tahun yang akan datang, itu menjadi masukan saya.

Kemudian yang kedua, yang perlu kita pikirkan adalah dari sisi *market*. Bagaimana bisnis *matching*, tadi Bu Dirjen sudah menjelaskan bisnis *matching* kenapa? Karena sentra IKM ini kebanyakan mereka itu adalah tidak familiar dengan *market* ya. Memang dia bisa mengolah mulai dari apa namanya, mulai dari bahan baku sampai pengolahan, sampai dia jadi produk, dia punya keahlian di situ tapi dia tidak, *unfamiliar* terhadap *market*. Kualitasnya bagus, bahan bakunya juga bagus dan dibutuhkan, tapi dia tidak punya keahlian untuk masuk ke *market*. Ini yang kebanyakan juga problem, kalau itu yang terjadi maka lagi-lagi ini juga akan mangkrak, begitu dia produksi, dia udah punya rumah produksi, sudah produksi, *enggak* terserap di pasar, *enggak* terserap di *market*, akhirnya apa? Stress, bangkrut dan lain sebagainya.

Ini juga akan menjadi variabel yang kedua yang harus kita pikirkan, bagaimana bisnis *matching* daripada pelaku-pelaku IKM ini, ini menjadi penting. Kalau unsur pertama tadi saya katakan dan juga kedua itu bisa kita lakukan bantuan terhadap mereka, saya kira nanti soal akses ke perbankan dan lain sebagainya tentu akan menyesuaikan saya kira, karena portofolio bisnisnya kalau udah jalan, bank juga akan melirik, *trust*-nya juga akan tumbuh.

Nah, ini ke tiga ini menurut saya yang paling penting yang kita lakukan untuk mendorong sektor IKM. Yang berikut yang kedua soal bagaimana makanan-minuman, nggak itu sektor IKM-nya aja secara makro. Ini yang kedua adalah bagaimana soal makanan-minuman, sama juga. Masak sih daerah sebesar ini bangsa ini, kita punya sekarang kalau kita minum kopi Starbuck, bukan begitu Ibu Tjiptaning, Starbuck. Padahal kopi kita terkenal, ada kopi Gayo, ada kopi Lintong di kampung kami, ada kopi Toraja, macem-macem, ada kopi Lampung. Padahal dari sisi harga kita minum di Starbuck aja udah 40.000 atau 50.000 malah, kita minum di di warung kopi, kopi Aceh misalnya hanya 5.000 perak satu gelas, padahal lebih enak di warung kopi Aceh misalnya gitu.

Ini juga akan menjadi ada apa sih kok bisa begitu, ini juga menjadi perhatian kita bersama supaya bagaimana *upgrading* mereka-mereka ini karena dari sisi kualitas mereka sudah, paling tidak sudah mendekati bagus tapi bagian persoalan berikutnya adalah *upgrading* mereka. Tadi yang disampaikan Pak Bambang masak untuk gula rafinasi aja terhadap industri kecil menengah yang membutuhkan gula tidak kita pikirkan, yang kita pikirkan adalah hanya gula yang untuk kebutuhan industri. Padahal makanan dan minuman kita cukup banyak IKM-nya yang sangat terkenal, bukan hanya kopi saya yakin misalnya di tempat kami saya pernah melakukan Bimtek Perindustrian yang dari IKMA, itu coklat, makanan-minuman dari coklat. Jadi ibu-ibu itu mengeluh kepada saya Mbak Mulan, dia bilang coklat ini dia tumbuh ya karena coklat itu kan selalu dimakan Mbak Mulan, Mbak Ratna itu maksud saya gitu. Jadi di daerah itu tumbuh bagus coklat, selama ini coklat itu hanya di jual diambil pengumpul, lalu kemudian dijual ke toke dan seterusnya dan seterusnya. Lalu karena Dirjen IKMA melakukan Bimtek aspirasi kita, ibu-ibu itu bilang kepada saya, bisa nggak kami dilatih untuk mengolah coklat dan sekarang produk mereka, ini tadi lagi-lagi soal bisnis *matching*, produk dari ibu-ibu ini yang pernah dilatih oleh Dirjen IKMA ini, sekarang produknya sudah bisa di beli orang di Bandara Silangit karena saya sambungkan mereka.

Jadi saya juga apresiasi terhadap Dirjen IKMA yang sudah melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu ya, produknya bisa dibeli di market. Waktu itu saya minta Angkasa Pura tolong dong titipkan produk daripada ibu-ibu ini coklatnya, sekarang mereka udah bisa nikmatin Bu Dirjen makanannya.

Nah, pertanyaannya adalah hal-hal seperti ini, ini harus kita tumbuhkan Bu Dirjen ininya soal makanan minuman, apakah yang berbasis sentra IKM dari gula dan lain sebagainya itu menjadi perhatian kita. Yang utamanya tadi saya bilang, kita inventarisasi sentra IKM yang kuat dan kita fokuskan kita mendorong di sektor tersebut.

Terima kasih Pak Bambang.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik. Terima kasih Pak Lamhot.

Intinya sama Bu bahwa kami semangatnya ingin memperkuat IKM dan mendapatkan fasilitas yang sama industri kecil menengah ini sama dengan industri besar.

Ini saya kasih contoh Bu, saya buka-buka Google, ini contoh kopi hitam gula khas Bogor, ini dapat nggak fasilitas ini rafinasi, sedangkan kopi Kapal Api dapat. Ini kopi Lantai banyak Bu, ini IKM kan pasti, industri-industri kecil kenapa ini diperlakukan berbeda dengan Kapal Api yang besar misalnya kan, mereka dapat fasilitas rafinasi. Sedangkan industri-industri kecil kayak gini kan kopi-kopi ini, ini baru kemasan kopi *sachet*, nah ini yang harus jadi terobosan oleh Dirjen IKMA dan Dirjen Agro, harus ada di tengah-tengah mereka. Jadi jangan berat sebelah Bu, jangan kita pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian yang memiliki regulasi hanya condong ke industri besar, industri-industri semacam ini harus lindungi. Ini contoh kecil, saya boba kemarin, saya tanya beli gulanya? Sama Pak beli gula ini, *outlet*-nya ada berapa? Ada puluhan Pak, nah itukan berarti jelas ini.

Bahkan yang paling ini tuh itu apa namanya es podeng. Saya baru tahu kalau es podeng itu rupanya gerobaknya itu ratusan, pemiliknya satu cuma emang mungkin mereka nggak berbadan hukum, nggak punya *brand* yang tetap. Nah itu es podeng sehari saya bilang berapa gelas? Rata-rata mereka bilang 500 gelas. Kenapa ini berbeda dengan fasilitas Coca-Cola, ini perbandinganlah apakah mereka karena mereka pengusaha besar terus pengusaha kecilnya kita abaikan gitu. Buat kami itu sangat tidak adil, ini Dapilnya Bu Ning Bogor, apa kopi Bogor banyak nih, kopi plus gula tapi nggak dapat fasilitas gula rafinasi karena di Peraturan Permendag-nya masih *njelimet*, jadi harus bernaung ke koperasi yang jadi distributor.

Nah, yang namanya orang usaha itu ada namanya SIUP, ada izin kalau dia pabrikasi ada izin industri kan. Jadi kayak model kopi-kopi tadi kan pasti ada izinnya, kenapa harus nginduk ke koperasi. Kalau kita melihat ininya ya harus dilihat dari perizinannya aja Bu, masa bedakan gitulah. Giliran orang kecil kita harus nginduk ke koperasi kan, nah di koperasinya ntar *njelimet* lagi, IKM-nya disortir lagi dan ini buat saya unik, fasilitas pemerintah tapi lebih dilihat legalnya dari sisi korporasinya, badan usahanya itu koperasi tapi disini menentukan berapa industri yang ini, ini nggak fair Bu, yang mendapat fasilitas. Menurut saya ya harus dibuka lah, buka dan saya yakin usaha kecil akan sangat bergembira dan akan sangat berterima kasihlah kepada Dirjen IKMA dan Dirjen Agro, khususnya kepada Pak Menteri Pak Lamhot lah kan Menteri Perindustrian, ntar mereka pake stiker kuning semua, es podeng pakai stiker kuning, jadi es podeng kuning.

Selanjutnya Pak Nasril, silakan. Eh, ralat ada Bu Ratna, Bu Mulan.

F-GERINDRA (R. WULANSARI):

Terima kasih Bapak Ketua yang sudah mulai melupakan saya, berat ini dari hati.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Bambang, Pimpinan Komisi VII.

Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VII.

Yang terhormat Ibu Dirjen IKMA dan juga perwakilan dari Dirjen Agro.

Terima kasih atas pemaparannya.

Baik yang pertama, saya ingin bertanya mengenai di halaman ke-7 pemaparan Dirjen IKMA industri gula. Kebutuhan gula nasional ini sampai saat ini masih di atas kebutuhan, diatas produksi nasional. Nah, berarti masih banyak impor gula yang kita lakukan pada sampai saat ini, apakah ada langkah-langkah yang strategis atau keinginan yang kuat untuk kita menekan jumlah impor gula karena memang seperti yang kita ketahui akibat dari perang Rusia dan Ukraina ini *supply change* kebutuhan di dunia ini mengalami gangguan tentunya. Dan selain itu juga kita sangat berharap semangat yang tinggi terhadap ketahanan pangan nasional kita.

Yang selanjutnya adalah dari pemaparan juga bahwa pabrik gula yang mengelola tebu menjadi gula kristal putih untuk konsumsi langsung, ada 43 pabrik gula milik BUMN sedangkan milik swasta yang berjumlah 19 tetapi kapasitas produksinya tidak berbeda jauh Bu, dilihat di halaman 6. Nah, apakah yang menjadi kendala dan masalah dalam hal ini, apakah karena umur dari pabrik gula milik BUMN ini sudah tua yang menghambat produksi gula itu sendiri atau ada kendala-kendala yang lain.

Yang selanjutnya, pemaparan mengenai penyaluran gula kristal rafinasi kepada IKM yang sudah tadi Ibu sampaikan di sini melalui koperasi dan di mana ada 1.916 anggota koperasi pelaku UMKM, dan terdapat 7 produsen penyalur gula rafinasi kepada koperasi yang saya lihat di sini hanya terdapat di 7 titik wilayah provinsi, sementara di data sentra IKM ini hampir merata di seluruh provinsi ada gitu loh, terus gimana nasib-nasib mereka yang di luar dari wilayah provinsi yang belum ada produsen penyalurnya, nasibnya gimana gitu. Di dapil saya aja yang udah ada penyalur, produsen penyalur gula rafinasi masih banyak kok yang ngeluh, Bu kita belum dapat nih gula rafinasi, masih banyak yang ngeluh, apalagi nih Bu banyak banget wilayah provinsi yang belum ada produsen penyalurnya.

Mungkin itu saja yang saya sampaikan, terima kasih atas kesempatannya Pimpinan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali lagi kami tidak melupakanmu, cuma tadi sedikit terlewat.

Baik, selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa, atau Nasdem, Nasdem nggak ada. Fraksi Kebangkitan Bangsa Ibu Ratna jelita, Juwita.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Ketua, Pimpinan serta seluruh sahabat-sahabat Komisi VII. Yang kami *banggakan* Ibu Dirjen IKMA beserta segenap jajarannya. Perwakilan dari Dirjen Agro beserta jajarannya.

Terima kasih atas pemaparannya Ibu dan Bapak, semakin banyak yang dipaparkan tentu semakin banyak yang akan kami pertanyakan karena di antara pemaparan-pemaparan tersebut ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang lihat di lapangan, khususnya seperti apa yang tadi udah disampaikan oleh sahabat-sahabat kami ya, bagaimana kelangkaan gula termasuk gula rafinasi sebagai salah satu bahan pokok untuk industri makanan dan minuman yang sebenarnya kalau dari persentase itu peningkatannya cukup signifikan dari mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 ada kalau tidak salah 7,58%. Ini jumlah yang seharusnya bisa kita banggakan, namun ternyata jumlah ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Tadi kan semangatnya sudah satu frekuensi ya Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kita ingin memberikan proteksi terhadap peningkatan usaha dari industri kecil dan menengah ataupun UMKM juga.

Sehingga, kami mohon untuk ke depan, harus ada tata kelola yang lebih baik, toh ternyata peningkatan jumlah impor gula yang dilakukan itu tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan para petani tebu kita. Harusnya kalau misalnya barang ini *demand*-nya tinggi, mereka sebagai pemilik modal terbesar dalam tata kelola niaga ini merekalah yang harus mendapatkan keuntungan terbesar begitu, tapi beberapa waktu kemarin kami juga sempat mengadakan audiensi dengan para petani tebu ya, itu ternyata mereka tidak meningkat juga kesejahteraannya. Lah ini berarti kan ada *dispute* di sini, bagaimana negara harus hadir untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan dari para petani tebu lokal kita dengan pemenuhan kebutuhan dari industri-industri kecil dan menengah yang saat ini sedang kita laksanakan untuk bisa segera terpenuhi.

Apalagi berdasarkan Perpres Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional, salah satu permasalahan utama yang wajib diselesaikan di sektor industri makanan olahan di dalam negeri adalah minimnya pasokan bahan baku. Ini sangat disayangkan, saat kita menyatakan diri sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya melimpah, hal ini merupakan kejadian yang sangat amat anomali. Saya berharap sebagai mitra kami, Kementerian Perindustrian bisa mengambil peranan, bagaimana bisa *support* para produsen bahan baku kita, baik itu petani, peternak, nelayan untuk bisa mengembangkan bagaimana bahan baku-bahan baku ini menjadi bahan baku yang memang dibutuhkan oleh industri, bukan bahan baku yang diekspor,

diproses di luar, lalu kita harus impor kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ini mohon bisa-bisa segera di rumuskanlah tata kelolanya, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama untuk mengatasi kondisi ini.

Yang berikutnya, kami juga ingin menanyakan ya sejauhmana peranan dari Kementerian Perindustrian untuk bisa bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan jasa-jasa perbankan kita pada saat ini terkait program pemberdayaan yang bisa disalurkan secara cepat dan tepat kepada industri kecil dan menengah. Kalau tadi disampaikan oleh sahabat kami Pak Lamhot kalau misalnya pemasangannya itu sudah mampu begitu, tentu jasa-jasa perbankan akan melirik juga tapi saya ingin Kementerian Perindustrian mengambil langkah yang aktif di bidang ini gitu, jadi jemput bola Bapak/Ibu. Bapak dan Ibu yang harus menawarkan, memiliki daya tawar kepada Kementerian Keuangan maupun jasa-jasa keuangan yang kita miliki supaya ini IKM ini, UMKM kita mereka itu mendapatkan porsi yang sesuai. Mereka juga mendapatkan prioritas yang selama ini digembar-gemborkan oleh Bapak Presiden. Saya harap Bapak dan Ibu juga tidak segan untuk bisa istilahnya apa ya bisa menjadi *marketer* untuk IKM kita lah, kita yang menawarkan diri kepada jasa-jasa keuangan tersebut.

Yang berikutnya tadi saya membaca di halaman 8, pemaparan dari Ibu Dirjen IKMA. Di sini banyak sekali program-program untuk meningkatkan daya saing IKM maupun sentra IKM, kami apresiasi cuman yang ingin saya tanyakan di sini adalah sepertinya Ibu, program-program ini yang Ibu sampaikan ini dari tahun ke tahun itu sama. Sehingga kami ingin menanyakan khususnya untuk program unggulan *One Village One Product*, bisa dipaparkan nggak ya kepada kami kira-kira capaiannya itu ada *nggak* untuk mengukur indeks *output*, *outcome*, *benefit* maupun *impact*-nya sehingga kami bisa mengetahui karena jujur Bu, kalau tidak salah ini di beberapa kementerian atau lembaga juga mirip seperti ini programnya, Ketua.

Jadi kami berharap bahwa Kementerian Perindustrian juga bisa melaksanakan sinergi dengan kementerian-kementerian yang lain, contoh program ini *One Village One Product* ini dimiliki juga oleh Kementerian Pedesaan. Jadi kalau misalnya sudah punya program yang sama begini ya, ini *database*-nya siapa yang punya sehingga kita bisa ngerti dari sekian ribu desa yang kita miliki se-Indonesia kalau nggak salah ada 81.000. Lah itu Kementerian Perindustrian sudah punya berapa desa, Kementerian PDT ini sudah punya berapa desa jadi kita bisa mengukur. Sehingga program yang tentunya juga ada alokasi anggarannya ini bisa tepat guna, tepat daya begitu.

Yang berikutnya terkait restrukturisasi mesin dan peralatan, fasilitasi permesinan, revitalisasi dan pembangunan sentra IKM, ini menarik ini Ketua. Kira-kira Ibu, program-program ini sudah dilaksanakan juga untuk pabrik-pabrik gula kita belum, baik yang BUMN mungkin yang ini untuk yang BUMN ya karena sama-sama plat merah begitu ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Mulan kalau BUMN kita punya sekitar 43, swasta kita punya 19 tapi kenapa hasilnya kok hampir mirip. Nah, ini berarti fungsi dari program peningkatan daya saingnya ini ada di mana begitu dan kalau memungkinkan kami bisa meminta kepada Kementerian Perindustrian cobalah ini dikoordinasikan dengan Badan

Riset dan Inovasi Nasional, peneliti kita udah punya belum yang fokus di bidang ini, mereka sudah punya temuan belum untuk mesin-mesin yang Ibu cari ini. Sehingga kita bisa memperkuat TKDM kita dengan memaksimalkan produk unggulan dalam negeri.

Mungkin itu saja pimpinan yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Mohon maaf, kami akhiri.

*Wallahul muwafiq Ila aqwamitthariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRA/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya Fraksi Demokrat.

F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):

Baik, terima kasih Pak Pimpinan.

Selamat sore.
Salam sejahtera buat kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan juga teman-teman Anggota Komisi III, eh Komisi VII, *sorry*, serta Ibu Dirjen dan juga yang mewakili Dirjen Agro.

Terima kasih atas paparannya Ibu Dirjen dan juga beserta yang mewakili Dirjen Agro.

Pertama, saya boleh komentari paparan yang disampaikan ini seperti saya dalam suasana kuliah Bu, artinya saya melihat, membaca dan memahami materi Ibu ini terkesan adalah sosialisasi gitu ya, terus kutipan berita. Saya lihat tidak adanya kondisi atau informasi kinerja yang Ibu lakukan gitu loh. Jadi ini terlihatnya ini hanya informasi Bu, maka saya katakan tadi saya seperti di kuliahan gitu loh. Nah, untuk itu saya berharap sebenarnya paparan dari Dirjen IKMA dan Agro itu adalah terkait dengan kinerjanya agar apa, agar kami juga bisa melihat apakah program-program di dirjen, 2 dirjen ini ada di dapil kami, supaya kami juga bisa menyikapi ataupun mendorong program-program di 2 dirjen ini ke dapil kami.

Nah, untuk itu saya kira pada kesempatan ini saya mohon membuat dan meminta jawaban Ibu Dirjen IKMA dan Agro untuk menyampaikan kepada kita pertama, apa peran dari kedua dirjen ini terhadap IKM untuk terkait dengan daya saing. Saya mau lihat apa programnya, apakah cuman hanya *supporting* atau apa namanya ya pendukung aja, menyampaikan regulasi atau apa peran teknisnya gitu. Artinya kondisi awal itu apa dan untuk apa nantinya, kita harapkan seperti itu Bu, seharusnya setingkat dirjen sudah menyampaikan kondisi seperti itu, awalnya apa hasilnya apa. Nah, ini kita pengen tahu apa

yang dilakukan kedua Dirjen ini terhadap IKM, untuk terkait dengan daya saingnya.

Yang kedua, kita juga pengin tahu apa kegiatan program ke dua dirjen ini terkait menghasilkan produk ekspor terhadap IKM ataupun industri lainnya ya. Tolong dijelaskan ke kita, kondisi awalnya apa setelahnya apa. Saya yakin selama ya kita bilang sampai bulan Mei ini ya pasti adalah program-programnya. Tolong lah sampaikan ke kita ya biar kita tahu ngukurnya, apakah program Dirjen ini sudah optimal atau perlu apalagi yang perlu kita dukung juga, artinya mungkin bisa terkait dengan anggaran gitu.

Berikutnya juga penguatan struktur industri, kita mau tahu juga apa yang sudah dilakukan. Terus kondisi apa yang Ibu petakan, potret terhadap industri nasional ini di wilayah area ibu itu. Terus kondisinya apa, harapannya apa, ini juga perlu kita tahu Bu, saya lihat saya nggak dapat ini. Terus dampaknya terhadap dukungan Ibu terhadap kesempatan ... (*suara tidak jelas*).. ini apa. Ini kan kita perlu tahu semua Bu, menurut saya harus terukur semua ya, harus diukur juga dampaknya apa, apa kesempatan kerja sudah sampai mana kesempatan kerja atau tambah atau kurang, inikan kita perlu tahu juga, kalau tambah ya syukur. Itu yang saya kira ke dua dirjen ini perlu disampaikan ke kita secara tertulis aja ya, nggak usah disampaikan, tertulis saja karena nggak mungkin Ibu diceritakan lagi. Jadi tolong disampaikan ke kita, peran dari ke dua dirjen ini terhadap apa yang saya sampaikan tadi 4 item tadi.

Berikutnya, ada permasalahan-permasalahan di industri kecil dan menengah ya, baik itu ada bahan baku, produktivitas, akses pasar, pembiayaan, nah ini saya lihat Ibu sampaikan di paparan ini. Kami pingin tahu Bu dari apa yang permasalahan yang Ibu potret ini, apa sebenarnya yang terjadi. Jadi jangan Ibu katakan permasalahan industri menengah, produktivitas, bahan pembiayaan ini kan Ibu harus sampaikan ke kita. Saya yakin Ibu sudah potret semua industri ini, sudah tahu, sudah Ibu petakan tapi nyatakan dong sama kita, sampaikan ke kita apa yang terjadi gitu loh, jangan hanya nyatakan ini permasalahan politik, inikan secara teori. Kita ingin dengar apa yang sudah Ibu potret ke dua dirjen ini, kita ingin tahu. Jadi biar kita tahu mengukur kinerja ke dua dirjen ini, itu yang perlu disampaikan.

Yang terakhir untuk Agro, makanan dan minuman. Saya mau tahu Pak, apakah memang Dirjen Industri Agro ini membina industri makan-minum di Indonesia ini Pak.

Interaksi dulu Pimpinan sebentar, silakan Pak.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Selama ini kita membina industri makanan dan minuman.

F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):

Baik, artinya ruang lingkupnya Bapak, izinnnya atau apanya yang mau, mohon jelaskan.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Kalau untuk perizinan semuanya kan di atur OSS Pak, jadi kami hanya membina industrinya secara cara apa namanya, secara iklim usahanya dan pembinaan di dalam iklim usaha, lebih banyak iklim usaha dan peningkatan kapasitas dari industri makanan dan minuman tersebut, Bapak.

F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):

Terima kasih.

Saya kira Pimpinan, ini perlu ditinjau ulang ini apa sebenarnya Tupoksi dari Dirjen Agro ini terhadap industri makanan minuman karena makanan minuman ini ada yang besar kecil dan besar. Bapak nggak jelaskan kepada kita, Bapak tuh pembinaannya di kecil dan menengah atau besar karena dilihat disini semua adalah industri makanan-minuman. Sedangkan makanan-minuman di sinikan ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Maupun juga yang terkait dengan contoh makanan, *franchise* ya kan ada juga, ini sampai sejauhmana peran Bapak melakukan pembinaan ruang lingkup ini. Contohnya di kompetisi ini saya nggak tahu Pak, kompetisi produk-produk lokal dengan import kan terlalu tajam Pak. Ini peran Bapak di mana di sini, itu maksud saya tadinya mau saya kejar di situ. Apa sebenarnya peran Bapak di industri makanan-minuman ini gitu, termasuk bahan pokoknya. Itu yang sebenarnya yang mau saya mau kejar tadi, rupanya hanya kelihatannya mau lihat iklim usahanya aja gitu, tidak dalam gitu loh. Tapi sekali lagi saya berharap Dirjen Industri Agro ini tidak hanya mendorong iklim usaha, tapi saya kira iklim usaha itu juga nggak tahu apa indikatornya sih, nggak tahu saya tuh bagaimana yang baik atau tidak kacamata dari Industri Agro gitu loh.

Saya terus terang aja, saya belum memahami bener apa peran dari Dirjen Industri Agro untuk meningkatkan industri makanan minuman, saya terus terang belum melihat itu Pak. Kalau soal apa namanya gula, segala macam itu kan materi apakah, materi dari makanan minuman ini tidak hanya gula, masih banyak lain Pak. Jadi ini kelihatannya fokusnya ke gula, gula, gula terus, memang gula manis sih, bener gula itu manis. Saya kira saya belum betul-betul puas nih Pak Pimpinan atas paparan dari ke dua dirjen ini.

Terima kasih saya kembalikan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih Pak Hendrik.

Itu yang disampaikan Hendrik ada betulnya, kayak Bu Dirjen IKMA ini kita di dapil kan melatih ya kan. Bahkan yang paling banyak itu dilatih terkait makanan-minuman juga Bu, mereka pada nanya ke saya, Pak kita habis dilatih diapain, bahan bakunya tinggi nih kan. Jadi itulah yang menjadi salah satu pemikiran kita Bu, pemikiran kita bagaimana ke depan industri-industri ini tidak

ada sekat sistem yang malah menjauhkan mereka dengan fasilitas negara. Kita menyadari bahwa kebutuhan gula dalam negeri masih tidak sebanding dengan, ketersediaan gula produksi dalam negeri. Maka itu ada dibuka di dalam Undang-undang Ciptaker bahan baku penolong, tapi ini yang kita minta jangan bahan baku penolong untuk industri besar saja tapi industri kecil ini, yang kecil-kecil ini yang harus kita tolong, kalau nggak dia mati kan.

Nah, inilah tapi uniknya ini tersandera oleh satu aturan Permendag. Di mana di satu sisi Permendag ini memperumit sistem yang presiden kita kan tahu pengennya *simple*, langsung *direct* ke pelaku usaha, ini malah diperumit harus ada izin dari koperasi, koperasi harus, kok koperasi bisa menaungi industri ini unik juga saya bilang. Di nama-nama industri biasanya asosiasinya asosiasi usaha kan, Kadin atau apa gitu kan, ini asosiasinya industri ini udah kaya usaha-usaha dagang yang pribadi-pribadi. Kalau memang industri kecil berbadan hukum ini saya pikir itu tidak tepat kalau cantelannya ke koperasi.

Jadi inilah sistem-sistem yang mempersulit atau memberikan fasilitas terhadap industri kecil ini yang kita minta supaya dirubah, kecuali ada undang-undang yang mengatur, selama itu bukan undang-undang ya tidak bisa juga Permendag membatasi itu gitu loh, apalagi ini untuk usaha kecil yang memang wilayahnya di wilayah industri kecil dan menengah. Jadi ada fungsinya apa yang disampaikan Pak Hendrik tadi, fungsinya apa? Entar kita bisa paparkan, inilah Dirjen IKMA yang membentuk industri kecil itu menjadi menengah, yang menengah menjadi besar kan, dari apa? Dari atas kerja sama dari Dirjen Agro memberikan bahan baku penolong sesuai turunan Undang-undang Ciptaker kepada industri-industri kecil ini agar mereka besar, Pak. Masa Boba sampai 10 tahun, itu yang boba bulet-bulet tuh saya kaget tuh, ternyata itu *franchise*, itu banyak merata, tapi mereka belinya sama dengan GKP (Gula Kristal Putih) kan nggak *fair*, padahal mereka industri berbadan hukum dan bahkan mereka *franchise* itu harus bayar ke pemilik *brand* itu.

Nah, inilah yang nggak satu sisi tidak *fair*, masa usaha-usaha besar kayak ini kan, yang gede-gedelah Sprite gitu, susu mereka dapet fasilitas. Ini yang saudara-saudara kita pengen jadi usaha besar, nggak bisa Bu. Nah itu *brand-brand* asing untuk, brand asing di fasilitasi oleh impor bahan baku asing, harusnya impor ini lebih dikedepankan kepada industri kecil ini Bu gitu ya.

Selanjutnya kepada Fraksi Keadilan Sejahtera, nah ini keadilan dulu baru sejahtera.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Meneng wa'e. Sorry.

Salam sejahtera buat kita semua.

Kalau mau kampanye batu pualam indah dipahat.

Cerah diterpa mentari pagi.

Kalau salam tak dijawab.
Semangat kita ulang sekali lagi.

Oke ya, terima kasih Mas Bambang dibekali rokok kemarin, saya bingung lihat rokok. Nah itu rokok itu di PKS ahli hisab, panjanglah cerita kita soal rokok, maksudnya, industri juga itu kan.

Baik Pak, ini terima kasih atas berapa paparannya.

Jelas bahwa dekade terakhir ini akan terjadi perebutan ya sumber daya yaitu *water*, *food* dan energi di situ kita akan bersaing ketat dengan negara-negara lain karena penduduk dunia tuh mencapai 8 miliar. Makan ini *mangap* terus nih, pagi, siang, sore, bangun tidur orang langsung cari makan. Jadi ini perlu kita perhatikan apa yang disampaikan industri UMKM, apakah dia UKM, apakah itu tuh sangat, kalau di Jepang sendiri saya pernah jumpa dengan menterinya itu 95% ekonomi Jepang tuh 95% didukung oleh UKM, UMKM ini Bu, kuat gitu. Jadi dia tuh basisnya itu bukan di pemerintah pusat, tetapi di masyarakat 95% bayangkan, bahkan saya pernah mengunjungi pusat-pusat UMKM-nya itu mereka tuh bikin balok-balok beton tuh masuk UMKM juga rupanya dan ada beberapa siswa Indonesia di situ. Tapi saya ini Bapak-bapak sekalian, mungkin pernah mendengar istilah Tokyo Banana, Tokyo Banana ya, saya juga penasaran Tokyo Banana nih apa. Padahal di Jepang itu yang ada pohon beton aja itu nggak ada pohon pisang sama sekali, tapi Tokyo Banana tuh apalagi orang Indonesia mohon maaf Mbak ya agak norak gitu ya. Pisangnya tuh gudangnya di sini tapi kalau ke Tokyo pasti cari Tokyo atau Banana Tokyo, Tokyo Banana itu. Sebetulnya isinya itu kue bolu mirip pisang, kuning jadi Tokyo Banana disebutnya.

Jadi saya melihat mereka ini apa ya, orang Jepang tuh kan untuk makanan ya terutama mereka ini dulu apa *appertizing* dulu Mbak, Bu ya, Bu Dirjen. Jadi mereka itu dan juga Bapak Dirjen, *seeing* dulu sebelum rasa itu dilihatnya enak dulu. Kalau Tokyo Banana itu mungkin dengan bolu-bolu kita maaf ya dari Medan ini ada bolu Meranti, ada bolu apalagi Pak Hendrik yang baru itu, Napoleon, Bolu Toba itu kalah rasa, cuman tampilan Tokyo banana ini tampilannya enak dilihat gitu. Jadi borong sampai kehabisan, di bandara banyak orang jual Tokyo Banana namanya. Bayangkan di satu daerah yang *nggak* ada pisang, dia bisa bikin *brand banana* coba. Itu jadi apa *gimmick* Jepang udah biasa, mochi, mochinya aja nggak tahu, saya bukan penggemar mochi tapi kalau melihatnya gemes mau makan. Padahal kita di puncak dulu di Cipanas sudah sering juga sebenarnya beli-beli mochi ini, di Semarang tuh, di mana-mana tapi dia itu berbagai macam warna, menggoda sekali.

Jadi kita ini sedikit dulu Bu ya, Pak Bapak Dirjen ya. Kita ini, saya besar di Jakarta Pak Dirjen, dari kecil tuh emplek-emplek tahu, emplek-emplek itu terigu digoreng sampai sekarang dia berubah nama memang, tapi itu barangnya cireng, cilok, cimol, cilor, cigo nggak ada ininya gitu, nggak ada apa bukan *mbok* diolah sedikit gitu. Jepang itu misalnya ngiris itu Mas, ngiris daging ikan tuna, sashimi itu aduh sampai dikasih daun sedikit gitu, jadi menarik. Tadi ada saran dari temen-temen jangan terlalu banyak makan sashimi nanti

suaranya bisa berubah, beberapa udah berubah waktu itu "meong" gitu, itukan ikan mentah, sashimi itu kan ikan mentah. Jadi berubah suaranya.

Jadi ini aja pertanyaan saya itu misalnya mie saja mereka, mereka ada yang ramen, apalagi soba, udon, sirataki sekarang, macam-macam lah ya. Maksud saya itu apa untuk meningkatkan nilai jual sebetulnya itu, apa peran Kemenperin dalam hal ini, itu aja pertanyaan saya, untuk meningkatkan kualitas, tampilan jangan. Saya ada sih denger beberapa sekarang udah ada tuh mas empek-empek premium, itu Gunhar pernah ngasih tuh, mana Pak Guhhar ini, dia premium. Itu maksud saya itu kan orang mau bawa oleh-oleh, tapi kan nggak mungkin Pak Raden lagi, nggak mungkin siapa lagi itu terus gitu loh zaman dulu ...*(suara tidak jelas)*... itu contohnya itu. Jadi menurut saya ini untuk meningkatkan harga juga dan nilai jual dengan bahan yang sama, tapi dikemas dengan berbeda.

Kemudian kalau yang kami lakukan ini sedikit aja cerita, di dapil saya itu banyak ada PTPN 2 dan 3, Pak Hendrik tahu ya. Persoalan mereka itu miskin orang-orang di sekitar perkebunan itu, sehingga malam-malam jadi ninja itu Pak Hendrik. Kalau Pak Hendrik dalam itu, mereka ngambil nggak banyak, 3 kilo, 5 kilo pakai ninja betul itu untuk makan. Saya pun membimbing mereka tuh gimana caranya supaya mereka makan sesuatu yang halal, yang ini, tapi memang kadang-kadang situasi ekonomi beda Pak. Saya terus terang melihat Sumatera Utara ini banyak yang kekurangan gizi, dulu kan pernah terkenal masanya Pak Lamhot itu apa koperasi Maduma itu, Pak Cosmas Batubara karena kurang gizi. Makanya terus terang orang kurban kalau bisa kirim lah ke Sumatera Utara ini, daging kurban besok nih jangan dimakan, orang Jakarta tiap hari makan daging.

Nah, jadi mereka itu tidak belikan ini Bu, Pak, alat-alat untuk masak kue, alat memasak kue, pemanggang kue oven gitu, kemudian mereka bikin dan sebagian mereka udah bisa tapi kemampuan kita terbatas. Kalau Pak Dirjen nanti ada misalnya program untuk ke situ, saya antarkan nanti kesitu. Sekarang udah mulai, mereka udah mulai dipajang juga di pinggir jalan, saya lihat di pinggir jalan lintas itu hasil-hasil dagangan mereka. Kita ingin mereka terberdayakan, nah itu yang pertama. Jadi tadi poinnya adalah bagaimana meningkatkan ini nilai jual dari suatu produk yang sama bahannya, sama modal yang sama.

Yang kedua adalah tentang apa tadi gula ya, gula ini bahaya Pak. Semua penyakit bersumber dari gula ini karena gula ini nggak bisa diolah oleh tubuh manusia secara berlebihan ya, orang dewasa cuman satu sendok teh per hari, sehari itu, kita makan pagi gula, siang gula. Saya pernah kunjungan ke sugar Labinta yang di Lampung ya, itu kalau apa namanya Belko itu sampai panas itu, Komisi VI kita yang di atas itu. Belkonya itu segede korek api saking jauhnya gula itu Allah *ya karim* gula itu. Jadi dalam satu dialog terungkap lah, saya tanya apa saja yang menggunakan gula ini rafinasi, gula industri. Jadi semua *soft drink* pakai itu dan over penggunaannya, apakah itu namanya Coca-Cola, apakah itu Sprite, apakah Fanta, apakah termasuk kecap ini semua kecap manis pakai gula, sirup itu 80% gula, susu kental ini gula aja itu, susunya entah di mana itu, Mas. Jadi itu sebenarnya nggak sehat bagi tubuh kita, kita

lihat hampir semua produk minuman dan minuman yang manis-manis itu bebas aja, padahal dia kalau ke otak jadi stroke, ke jantung. Jadi 70% penyebab serangan jantung bukan kolesterol, gula, obesitas itu gula, itu Bu dokter ada tuh, Mbak Ning tuh lebih jago dia.

Jadi ini yang saya ingin tanyakan adalah Bu, Bapak Dirjen apa pengawasan terhadap konten suatu produk. Apakah terlibat juga selain BPOM misalnya seperti itu, apakah produsen juga secara random mencoba untuk melihat kandungan-kandungan, jangan kita nih disuguhi makanan yang nggak ini, yang nggak sehat apalagi anak-anak kita nih jajan kan, rata-rata 30 tahun lah kena gula. Di Jepang tuh anak kecil tuh 2 yang nggak boleh, satu mie instan, kedua gula sampai umur 15 tahun mereka nggak boleh konsumsi itu. Jadi ada anak keponakan saya itu dikasih di sini susu pakai gula tuh dimuntahin, apa ini rasanya heran gitu ada manis-manis, sampai begitu.

Yang terakhir pertanyaan saya adalah bahwa ini sudah saya baca data 2021 Bu, impor gula kita itu realisasinya hampir 70% ya di data walaupun ada yang menyampaikan di data lain 80%, tapi kita ambil yang 70 ini. Nah, ini kan udah lama ya masalahnya itu di mana sih, apakah Kementerian Perindustrian sudah punya satu *roadmap* jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kira-kira kita mau begini terus, bisnis *as usual* terus, atau ada memang *will* kita bahwa kita tidak impor lagi itu gula, segini kita impor duit mulu nih, belum lagi terigu nih, belum lagi minyak pun yang kita ekspor pun kerepotan mendapatkannya. Jadi apa masalahnya ini di pabrikasi, teknologi, di bahan baku, perkebunan atau apa. Jadi 3 itu pertanyaan saya, itu Mas Bambang saya pikir cukup.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi bener Pak Menteri ya bahwa kita nggak boleh bergantung impor, tapi kita juga sadar bahwa untuk saat ini pemenuhan gula dalam negeri masih tidak tercukupi jadi kita masih butuh impor. Bagaimanapun kita harus melindungi petani kita, petani tebu, nah yang kami garis bawah adalah jangan sampai impor ini yang mengorbankan petani tebu ini hanya yang menguntungkan industri besar. Jadi saudara kita yang petani tebu, saya yakin ikhlas ketika impor ini lebih diutamakan kepada industri kecil, mungkin itu Bu. Jadi ada asas keseimbangan gitulah, satu sisi ada saudara kita yang tersakiti karena masuknya gula impor, tapi ada satu sisi kita hibur saudara-saudara kita yang industri kecil, menengah ini mendapatkan fasilitas dari gula impor itu.

Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional, Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.
Ibu Dirjen IKMA dan segenap jajaran dari Kementerian Pendustrian yang kami banggakan.

Saya langsung ya Bu tanpa prolog, tadi ada catatan sekitar 65 juta pelaku industri kecil dan menengah, itu ada tergolong usaha kecil dan industri kecil. Saya ingin tahu yang dilakukan oleh Dirjen IKMA untuk pengsentralisasian atau sentra IKM, dari mulai Aceh sampai Papua berapa tersentra yang data dari Ibu. Data dari Ibu itu berapa sentra industri kecil dan menengah di seluruh Indonesia, kan berdasarkan ya PP 29 Tahun 2018 yang Ibu sebutkan di sini berapa sentra di situ.

Pertanyaan yang kedua, siapa yang membentuknya? Apakah kemandirian sampai ke pembinaannya di mana peran daripada Kementerian Perindustrian itu, karena seingat saya kalau industri kecil ini, ini nggak diatur pun hidup, tapi semakin diatur makin susah itu industri. Namun kita ada kesepakatan regulasi di sini yang kita sepakati, keluarlah PP demi PP termasuk Permenperin-nya. Peran daripada Dirjen IKM itu apa di sini, termasuk klasifikasinya. Klasifikasi daripada sentra itu apa dari masing-masing unit usahanya apa, apakah sentra dodol, apakah sentra kulit, nah dari seluruh itu di mana dari 33 provinsi saya minta jawaban tertulis, nggak akan mampu Ibu menyelesaikan hari ini, pasti.

Yang kedua, tadi peran Bu ya apakah termasuk ada pembiayaannya dan sebagainya karena saya melihat ya dari RKAKL dari Kementerian Perindustrian yang kami jumpai dan yang kita laksanakan di daerah itu tanpa, nggak ada bantuan tuh, hanya sekedar cakap-cakap sekaligus pelatihan-pelatihan yang sesungguhnya itu mubazir. Apa salahnya itu? Kita disuruh mengumpulkan sentra-sentra itu dan kita bantu apa persoalan mereka, teknologi, mesin, apa, itu yang harus dilakukan. Ini yang kami lihat bukti yang kita jumpai di dalam saya 6 bulan di Komisi VII ini.

Yang selanjutnya Ibu termasuk OVOP, kalau di daerah hari ini ya mereka mempersimpel dalam bentuk kelompok usaha bersama. Di pusat ya semakin *menjelimet* seperti apa yang ketika kita melihat regulasi pendistribusian gula rafinasi untuk sentra IKM. Sebelum saya masuk ke situ ya, itu satu hal untuk IKM.

Untuk yang dari Agro ya Pak, neraca komoditi gula siapa yang menyusun Pak, maaf Pimpinan, tolong dijawab Pak, neraca komoditi gula tahunannya.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Terima kasih Bapak.

Jadi untuk tahun 2022 ini Pak yang menyusun itu, jadi seperti kami tampilkan di layar tadi Pak semuanya itu usulan dari pelaku usaha.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Bukan, Bapak yang menyusun, dari Kementerian Perindustrian kan.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Di Kementerian Perindustrian di tempat kami Bapak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Dari kementerian Perindustrian ya, *oke*.

Kalau kita lihat skema permohonan penyaluran GKR melalui koperasi, nggak ada tuh peran dari Kementerian Perindustrian di sini, nggak ada Pak. Yang menyusun neraca komoditi gula kita, tetapi di dalam mengalokasikan IKM tidak kita. Artinya apa Pak, apakah Kementerian Perindustrian diatur oleh pengusaha besar, kami tidak setuju. Saya tanya Bapak, kalau Bapak bisa menjawabnya, berapa kebutuhan gula tanda kutip, apakah rafinasi dan gula putih untuk IKM dalam 1 tahun.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Tayangan kami tadi lebih kurang 500.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

500.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

500 ribu ton, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

500 ribu ton untuk IKM, IKM itu ya Bapak cek di nomenklatur ya Bu Dirjen, Ibu cek dinomenklatur di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian tidak ada namanya IKM, yang ada IKM itu di Kementerian Perindustrian, kenapa ini bisa lewat? neraca Bapak yang menyusun, tetapi pengalokasiannya Bapak tidak punya hak untuk melakukan itu. Berarti ini regulasi yang salah, seharusnya ya.

Pertanyaan yang kedua, siapa Ketua Asosiasi Industri Kecil dan Menengah Indonesia Pak? Nggak ada kan, nggak ada kan Pak. Jadi Bapak dapat input dari mana, masukan dari mana kebutuhan industri kecil dan menengah untuk gula rafinasi, dari mana, tolong dijawab Pak.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Jadi seperti di dalam tayangan kami tadi Bapak bahwa permohonan untuk kebutuhan itu diusulkan oleh koperasi yang akan diverifikasi oleh Dinas UKM dan Kementerian Koperasi sendiri, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Tahu persis saya itu Bapak bohong, Bapak bohong sampai hari ini koperasi-koperasi penyalur GKR sudah habis masa waktunya Pak, limit-nya sudah selesai, tidak ada yang *existing* hari ini, ditahan oleh pengusaha gula rafinasi, dari mana Bapak bisa tahu dari koperasi-koperasi, koperasi yang mana bisa Bapak boleh tunjukkan, jawaban apa pertanyaan kedua, koperasi mana coba Bapak sampaikan nanti tertulis kepada kami, koperasi-koperasi yang mengusulkan. Apakah dari Garut, dari Jawa Barat, dari Sumatera, dari Jawa Tengah, dari Surabaya, koperasi mana, kami ingin tahu data koperasi penyalur GKR karena hemat kami yang ada di bawah ya Bapak Direktur. Hari ini pelaku UKM, IKM, UKM yang kuliner ya maupun makanan dan minuman IKM makanan dan minuman hampir 80% itu membeli gula kristal putih, 80% itu membeli gula kristal putih tidak ada yang diperuntukkan untuk atas nama GKR untuk IKM. Tolong dicatat itu Ibu Dirjen, tidak ada dialokasikan untuk IKM, kenapa? Data nggak jelas, karena masukan itu dari Gapmmi semua kan, dari Gabungan Asosiasi Makanan dan Minuman kan pengusaha besar semua. Industri kecil dan menengah untuk makanan-minuman hampir 80% itu membeli GKP, membeli GKP, kalau Bapak tidak percaya, Bapak silakan survei taruhan telinga kita Pak. Kalau benar kata saya telinga punya Bapak dipotong, kalau saya salah telinga saya dipotong.

Ini Pimpinan, ini yang saya tahu persis Pak, bukan saya bukan pelaku industri gula, bukan juga ini pelaku ini produsen usaha makanan dan minuman tapi ini seakan-akan kita tidak menemukan data dan fakta yang benar dari Kedirjenan ini. Justru karena itu skema permohonan penyaluran GKR ini melalui koperasi, kami minta harga diri pada Kementerian Perindustrian harus ikut di sini. Benar kata Pimpinan, kalau lembaganya koperasi oke, tapi Bapak tahu sekarang kalau model skema yang PP 29/2018 tentang sentra-sentra tadi kalau 5 orang, 5 industri bergabung industri kecil tadi sampai 10 kan cukup KUB (Kelompok Usaha Bersama). Kalau membentuk badan hukum koperasi itu mereka habis 10 jutaan juga, benar ya Pak notaris dan sebagainya itu. Ini bagaimana mempermudah. Jadi peran daripada Kementerian Koperasi saya pikir cukup daripada daerah saja merekomendasikan ke Menteri Perindustrian, dimana peran perdagangan cukup di TKTN perlindungan konsumen ya dan tertib niaga, udah cukup.

Nah ini yang kami minta Bapak harus jeli untuk melakukan pendistribusian GKR, kenapa? Bapak yang menyusun neraca tetapi orang yang mendistribusikannya tanpa tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada Bapak sebagai neraca komoditi. Itu hal yang catatan kami yang sesungguhnya saya pikir perlu dimasukkan kesimpulan kan begitu karena di daerah-daerah itu kalau mengumpulkan modal koperasi Pak ya, 20 orang jenis yang sama tuh berat, 20 industri kecil tapi cukup KUB-KUB, 5, 5 sesuai dengan

ini PP tadi yang Ibu sebutkan tadi, sentra industri kecil dan menengah tadi, 5, 5, 10 mereka membikin kelompok usaha cukup direkomendasi kepala desa diteruskan ke kepala dinas, cukup, mereka tidak keluar biaya, nah ini regulasi *bottleneck* ini yang harus dipangkas itu Pak.

Jadi catatan kami itu bahwa hari ini carut-marut distribusi GKR untuk IKM itu tidak jelas, bahkan koperasi yang menyalurkan itu ya biasanya ya adalah orang-orang seputaran dekat dengan pabrik gula rafinasi. Jadi mereka dari hulu sampai hilir, Pak.

Ini catatan kami Pimpinan ya, ada beberapa pertanyaan tadi saya minta di jawaban tertulis untuk hal-hal data-data yang ini Pak yang kami minta dan terakhir tentunya ya kepada Ibu Dirjen ya peran sentra tadi saya sepakat. Maka sentra tadi ini diimplementasikan pada saat program-program kemitraan yang ada di DPR ini Bu, kan gitu. Dapilnya Pak Tif ada berapa sentra, butuh apa? Mesin kah, teknologi kah, kan begitu. Jangan nanti datang EO yang cakap-cakap saja itu udah nggak zamannya lagi, seakan-akan mereka sudah pelaku di bawah. Kalau untuk menciptakan *new enterprenuer* ya saya pikir sudah cukup banyak yang ada di di *handphone* kita ini, tapi mereka butuh pendampingan, butuh peralatan. Itu catatan kami kepada ke dua dirjen ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih.

Selanjutnya PPP, nggak ada. Baik mungkin yang virtual ada yang ini nggak, oh Pak Mukhtarudin.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Pak Ketua, Fraksi Golkar, nggak berani kita ada Ketua Fraksi ini.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati.
Ibu Dirjen IKMA dan Bapak Direktur yang mewakili Agro dan seluruh jajaran.

Saya satu aja yang terkait dengan IKMA aja Bu, ini kaitan dengan dapil saya saja. Kemarin saya ada kunjungan kerja reseslah lihat ada sentra industri di Seruyan Bu, di Kalimantan Tengah. Itu ada sentra industri yang dibangun waktu itu 2 tahun anggaran ya Bu ya, 2 tahun anggaran kurang lebih 60 miliar dananya kurang lebih.

Sentra industri ini kan kalau sudah dibangun oleh melalui dana APBN, harusnya diserahkan ke Pemda. Pemda wajib menganggarkan terhadap pengelolaan daripada sentra industri. Faktanya di Seruyan nih Bu, Pemda ini tidak menganggarkan untuk pengelolaannya, bahkan anggaran 2022 tidak

diangggarin dan saya khawatir ini kan sudah diserahkan oleh pusat kepada daerah. Saya takutnya ini barangnya rusak, barangnya bagus-bagus dari pabrik esnya bagus dan segala macam, mesin-mesinnya bagus, lengkap lah, sementara ini tidak dikelola dengan baik, takutnya ini rusak, hilang dan sebagainya. Bahkan di sana kan belum ada badan usaha milik daerah juga yang mengelola, belum juga ada OPT-nya yang ditunjuk untuk mengelola itu. Jadi kayaknya jadi semacam sesuatu yang masih statusnya ini tidak jelas ke depannya seperti apa. Nah, bagaimana peran Kementerian Perindustrian, walaupun dalam hal ini sudah diserahkan Bu ya, bagaimana apakah masih ada semacam pengawasan, koordinasi, kemudian mitigasi dan segala macam dalam daerah-daerah yang sudah mendapat sentra-sentra industri ini. Itu yang mohon perhatiannya.

Yang kedua, supaya tidak terulang yang seperti ini Bu, mungkin di awal waktu saya *nggak* tahu ya prosesnya seperti apa sentra industri ini. Supaya tidak seperti ada semacam sebuah kewajiban apa yang mengikat bagi daerah-daerah itu yang mengajukan sentra industri ini atau sudah di, sudah masuk dalam sentra industri kemudian dipanggil daerahnya, diadakan penilaian segala macam, mereka harus bikin kesepakatan ataupun perjanjian, atau seperti kontrak apalah yang mengikat. Sehingga begitu selesai wajib mereka mengelola dengan baik dan menganggarkannya dalam APBD, supaya tidak terjadi sentra-sentra industri yang sudah dibangun dengan dana yang cukup besar, tetapi akhirnya mubazir atau manfaatnya tidak tepat. Saya kira ini penting dalam proses perencanaan dari awal supaya tidak kejadian seperti di Seruyan ini *nggak* terjadi lagi. Pemda-nya *ogah-ogahan* untuk menganggarkan untuk apa tidak pengelolaan daripada sentra industri ini.

Saya kira itu aja Bu, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mungkin saya sedikit aja sebelum ntar dijawab singkat.

Jadi pertama saya ke Dirjen Agro dulu, coba saya pengen sedikit aja alur tadi penetapan neraca komoditas itu sesuai Undang-undang Ciptaker Pak, terkait gula rafinasi, *nggak* alur singkatnya aja dari mana, ke mana, terus siapa yang menetapkan gitu Pak.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi pada prinsipnya pelaku usaha Pak, pelaku usaha menyampaikan kepada melalui Sinas NK ini, dalam hal ini melalui, semuanya melalui *online* Bapak ke dalam Sinas Bapak, usulan kebutuhan bahan baku dan bahan

penolongnya. Nah, nanti dari usulan semua pelaku usaha tersebut terkait dengan sekarang ini ada 5 komoditas yang kita masukkan dalam itu NK Pak, itu KL teknis itu yang akan memverifikasi usulan kebutuhan dan kita akan juga menetapkan penetapan rencana kebutuhan. Jadi KL teknis ini tidak hanya di Perindustrian Bapak, ada juga di misalkan terkait gula ini juga karena tidak hanya, yang di tempat kami hanya gula rafinasi.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Yang saya maksud ini aja, singkat aja Pak, dari badan usaha ke Kemenperin terus dibawa Ratas ya, dibawa atau gimana gitu lah.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Jadi tidak ke Kemenperin Pak semua, semuanya melalui Sinas Pak, di INSW. Usulan itu masuk didalam INSW dan INSW nanti akan membagikan kepada KL teknik usulan-usulan tersebut Pak, dari itu KL teknis akan menetapkan bahkan akan memverifikasi usulan tersebut dan kita bisa menetapkan rencana kebutuhan dan penetapan pasokan kebutuhan tersebut. Nah, dari KL teknis ini melalui Sinas NK juga akan kita sampaikan kompilasi data ini ke Kementerian Perekonomian.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

KL teknisnya itu siapa Pak.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian juga di situ Pak masuk. Jadi misalkan untuk kebutuhan ikan itu KL teknisnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian KKP.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Rafinasi?

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Kalau gula rafinasi kami dan Kementerian Pertanian, nah itu nanti kita bawa ke dalam Kemenko dilakukan rapat Rakor teknis Eselon 1 dan Eselon 2 sampai tingkat menteri Pak, untuk ditetapkan sebagai kebutuhan kita di tahun akan datang. Setelah mendapat penetapan itu nanti pelaku usaha bisa mengurus perizinannya untuk mengajukan PI dan PE nya.

Mungkin itu Pak secara singkat yang bisa kami.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pelaku usaha yang dimaksudkan industri ya Pak.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Industri Bapak.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Boleh saya tanya lagi nih, definisi industri itu apa Pak?

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Ya tentu yang dimaksud di dalam pelaku usaha industri adalah kita, perizinan mereka menggunakan KBLI yang di dalam yang kita atur dalam neraca komoditas ini Pak. Jadi ada beberapa KBLI yang misalkan untuk gula ini ada KBLI yang terkait sama gula, bahwa mereka memang pelaku usaha yang memproduksi gula misalkan dalam hal ini gula rafinasi. Jadi tidak semua pelaku usaha yang bisa dapat mengimpor untuk gula rafinasi ini.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik, tujuannya dari maaf ya ini kan dari yang ini pemegang kuota itu ya Pak ya kan, jadi itu yang berhak mengimpor. Nah, gula rafinasi itu sendiri diperuntukkan apa, kan untuk industri kan, Pak. Definisi industri menurut Undang-undang 3 Tahun 2014 itu kan cukup jelas, "Seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi".

Jadi apa bedanya industri besar dengan IKM ini Pak, IKM ini judulnya juga industri Pak. Nah, ini yang kami pertanyakan kenapa terjadi perbedaan perlakuan terhadap industri kecil dan industri besar, padahal definisi industri itu berlaku global dan menyeluruh, baik industri kecil atau industri besar. Nah, ini satu, jadi ada perlakuan tidak adil kan terhadap definisi industri itu sendiri. Jadi kuota gula rafinasi ini hanya lebih diutamakan kepada industri besar, padahal kita tahu ini hak petani Indonesia yang terambillah, kenapa kita tidak perhatikan juga saudara kita yang industri kecil ini. Itu kedua.

Yang ketiga, terkait inikan terkait IKM ini dipayungi koperasi tadi yang diperdebatkan Pak Nasril tadi itu betul. IKM inikan kenapa dia harus menginduk ke koperasi, di mana terhadap industri yang berbadan hukum, industri kecil yang berbadan hukum membayar pajak pula, tapi dia tidak ikut kepada koperasi, nasibnya gimana kan. Kenapa nggak dibarengkan dengan usulan dari makanan-minuman perusahaan itu, ini industri-industri kecil ini selama dia

memiliki daya jual yang pasti kan ... (*suara tidak jelas*) ... terus berbadan hukum yang tetap kan, kenapa ini diperlakukan berbeda.

Saya tanya, yang terakhir Pak, Permendag Nomor 17 ini perubahan atas Permendag Nomor 1 Tahun 2019 kan. Ini jelas di Pasal 2 yang dipaparkan di halaman 10, Pasal 2-nya terkait bahan baku penolong. Namun di ayat (5)-nya padahal bahan baku penolong ini berlaku di Ciptaker itu berlaku untuk industri kan, tapi kenapa di ayat (5)-nya dipisah. Di Pasal 5 ayat (2) itu malah dipisah, padahal di Undang-undang Ciptaker setahu saya itu diberikan nama itu bahan baku penolong untuk industri, ketersediaan bahan baku industri. Kenapa untuk industri kecil langsung dipisah di sini kepada koperasi, seharusnya kan sama cuma mungkin skemanya sistem pengawasannya, sistem kontrolnya, sistem pengajuannya yang berbeda gitu loh tapi induknya tetap sama karena mereka sama-sama kita mendefinisikan sama-sama pelaku industri gitu loh. Mereka bayar pajak juga loh Pak, masa kita bedakan, misalnya ini Tropicana Slim dengan tadi yang kopi Bogor tadi kan masa dibedain kan gitu.

Jadi saya pikir kita harus berlaku adil, jadi jangan sampai juga suatu ketika ini industri-industri kecil ini untung nih mereka masih diem, masih *nerimo*, kalau mereka nggak terima mereka gugat lho Pak. Kalau saya pelaku industri kecil saya gugat Permendag ini karena tidak berlaku adil. Saya *judicial review* ke Mahkamah Agung karena Permen, kenapa? Karena tidak berlaku adil. Kita kan harus merujuk di dalam Pancasila kan jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi bukan bagi seluruh, hanya adil bagi seluruh pengusaha besar gitu loh. Jadi kita untuk industri kecil harus kita ini, apalagi ini diambil dari hak-hak petani juga gitu loh. Jadi kita ingin mendorong bahwa regulasi yang ada di Permendag ini toh ini juga mengacu Undang-undang Ciptaker kan, kenapa ini berlaku berbeda? Padahal Undang-undang Ciptaker kan sudah jelas disitu bahan baku penolong untuk industri.

Jadi seharusnya ini Pak Nasril, jadi seharusnya tidak ada lagi ruang koperasi itu, selama itu berbasis, ntar verifikasinya yang jelas, terserahlah mau melibatkan universitas di daerah, penegak hukum di daerah, silakan, yang penting tepat sasaran, tujuannya jelas untuk membantu industri kecil ini meningkatkan daya saing. Bahkan mungkin sistem pengawasannya juga boleh melibatkan penegak hukum, membuat Satgas misalnya, Dirjen IKMA, Dirjen Agro, Kepolisian, Kejaksaan jadi satu di situ mengawasi, ngirim ini, gunain, sekarang sudah canggih Pak, sistem digital, mereka bisa foto, lapor ini, 10 kilo diaduk buat adonan ini kan, itu jelas.

Jadi saya pikir kita ini Komisi VII biar ada manfaat buat saudara-saudara kita perpindahan mitra Perindustrian ke Komisi VII kita juga ingin dorong bahwa mitra kita jauh lebih berperan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya industri kecil dan menengah, mungkin itu.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ketua, saya pikir ya diskusi kita ini, walaupun badan usaha yang di bawah untuk mengayomi pelaku usaha industri kecil dan menengah itu koperasi, tapi cukup dari dinas langsung ke Kementerian Perindustrian. Jadi

tidak lagi ke Kementerian UMKM di sini Pak, kan gitu. Ya silakan saja kalau ada kelompok usaha bersama dan sebagainya, nah jadi tidak lagi Kementerian Koperasi. Ini sekarang kan *bottleneck*-nya itu Pak ada di Kementerian Koperasi, kan gitu. Kalau memang peran Kementerian Perdagangan penting ya penting karena di situ ada ini perlindungan konsumen dan tata tertib niaga yang mengawasi barang dalam pengawasan, itu benar, cukup itu saja. Ini kan alurnya panjang saya melihat, dari koperasi ke Dinas Koperasi, Dinas Koperasi ke Kementerian Koperasi, sementara pembinaan mereka juga tidak ada Pak ini mohon maaf juga kita, tapi ketika kampanye maupun kampanye presiden, kampanye DPR wah kita, koperasi itu kita elu-elukan, setelah terpilih presiden maupun DPR kita tinggalkan itu semua, kan itu yang terjadi. Sehingga kan anggaran terkecil di DPRD kabupaten kota maupun provinsi, maupun di pusat kan Kementerian Koperasi.

Nah, ini catatan ini sesungguhnya kami ingin ada skenario baru di dalam menentukan alokasi gula rafinasi untuk industri kecil dan menengah, itu peran daripada Kementerian Perindustrian di situ sangat kuat, bukan lagi di Kementerian Koperasi Pak, tapi di Kementerian Perindustrian. Itulah fakta hari ini keberpihakan kami dengan mitra kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya sepakat dengan Pak Nasril betul sekali, jadi gimana kita mau membantu industri kecil kalau alurnya *njelimet* Pak. Jadi mungkin ya, mungkin jalan tengahnya yang koperasi biarlah koperasi ngajukan, tapi yang industri memang berbadan hukum, Perindustrian yang mengeluarkan SIUP kan ya lewat langsung dinas aja harusnya kan. Jadi itu wilayahnya sendiri-sendiri, jadi seperti tadi jadi saya ingat Bu Ratna tadi kan, ada desa investasi eh desa industri. Jadi saya pikir kita biar nggak tumpang tindih, ranahnya koperasi silahkan dan mengajukan ke Perindustrian, tapi yang industri kecil juga silakan juga. Itu saya kasih contoh tadi apa namanya yang es-es tuh, Boba tadi itu belum tentu, mereka nggak berinduk terhadap koperasi, mereka berbadan hukum sendiri, gitu loh.

Pak ada satu yang ketinggalan saya, kewajiban di Permendag koperasi itu acuannya ada nggak undang-undang, bisa dijawab Pak. Mengharuskan koperasi itu harus lewat koperasi. Eh gula rafinasi, ada *nggak* undang-undang yang mengatur gitu.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Di Permendag, Pak adanya Pak.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Maksudnya Permendag, Permendag itu sebuah Permen itu adalah Juknis dari undang-undang. Jadi ketika nggak undang-undang, ini Permendag ini biar kita bisa ini sepihak, dia mengklaim kewenangan sepihak aja yang bukan Tupoksinya dia. Bahkan dibelahnya Tupoksi ini malah ngaco yang diberikan kepada Tupoksi yang orang lain gitu loh, jelas-jelas Kementerian Perindustrian ini membina dunia industri. Dunia industri itu kan ada banyak Pak ya kan, ada perseroan, ada CV ya kan, ada koperasi. Kenapa ini CV yang sejajar dengan koperasi harus dipaksa harus di bawahnya koperasi gitu loh. Gimana kalau itu entar kayak Coca-Cola kan, Kapal Api harus menginduk ke koperasi besar gimana, kan nggak *fair* kan. Mereka sama-sama badan usaha kan, memiliki ini apa namanya badan usaha yang memiliki kekuatan hukum juga kan. Nah, kenapa perlakuannya berbeda itu aja yang kami ini.

Jadi saudara-saudara kita dibawah itu kasihan Pak, sudah jualan susah di tengah pandemi gini malah mereka yang aktif loh Pak, membantu perekonomian Indonesia ini mereka. Tapi di satu sisi negara kita nggak memberikan kemudahan ke mereka gitu loh, jadi kita kasih, kan gula rafinasi dengan gula kristal putih itu disparitasnya jauh, masa iya ini jadi buat bercandaan lah kan, yang murah di kasih kepada pengusaha besar, yang mahal dikasih ke pengusaha kecil. Jadi kita niatan kita ini ingin memperkuat atau ingin mematikan gitu loh, kalau niatan kita ingin memperkuat, yang kecil juga harus dikasih lah biar kita berimbang gitu, jangan orang susah makin dibikin susah, yang kaya makin dipermudah itulah, jadi itu.

Pak Lamhot silakan.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Apa yang dimaksud Pak Nasril, Pak Bambang dan teman-teman yang lain tadi sesungguhnya niatannya adalah sangat bagus sekali. Jadi kalau menurut saya Pak Bambang sederhana aja, pertama ini kan melibatkan 3 kementerian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan. Maksud saya Pak Bambang, kita minta Kementerian Perindustrian, Dirjen Agro dan Dirjen IKMA mengkaji secara regulasi, apakah memungkinkan kebutuhan yang sektor IKM yang 500 ribu ton tadi secara regulasi bisa di *bypass* nggak gitu, kira-kira kan gitu Pak Bambang ya. Jadi misalnya kalau secara regulasi bisa kita *bypass* yang IKM ini langsung ditangani langsung oleh Dirjen IKMA dan Agro, dua-duanya langsung misalnya sebagai Ad Hoc di *bypass* ini Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan sehingga dari Badan Ad Hoc 2 dirjen ini langsung ke IKM-nya kira-kira secara regulasi mungkin nggak gitu.

Nah itu mungkin butuh pengkajian menurut saya, jadi saran saya Pak Bambang dan teman-teman Komisi VII karena niatnya, idenya ini sangat bagus ya karena tujuannya adalah bagaimana kita membantu para pelaku-pelaku IKM kita yang tadi kita katakan di depan ini sangat berkontribusi besar terhadap PDB kita. Hanya pertanyaannya itu kita kan nggak mungkin juga kita paksa

Dirjen Agro sama Dirjen IKMA ini, berikan dong nggak usah lewat koperasi, nggak bisa juga. Hanya menurut saya, ke dua dirjen ini mengkaji secara regulasi bisa nggak ini kita buat *bypass* untuk kebutuhan 500 ribu ini. Kalau kemudian secara regulasi bisa di *bypass* ya tinggal kita jalankan, simplenya begitu saja menurut saya Pak Bambang.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik Pak Nasril, saya bisa tangkap.

Jadi intinya bahwa Kemendag itupun sebenarnya merujuk kepada Undang-undang Ciptaker tapi dia tafsir sepihak, padahal Ciptaker itu, di dalam Ciptaker itu bunyinya bahan baku penolong. Sebenarnya, menurut hemat saya bahwa Kementerian Perindustrian itu masih punya ruang di situ untuk membuat aturan atau regulasi, juga mengacu kepada Ciptaker dengan rujukan bahwa ini wilayah industri. Walaupun ini industri kecil dan menengah, kasihan Pak jadi kita harus garis bawahi bahwa kita harus lebih mengedepankan saudara-saudara kita yang industri kecil ini. Jangan mereka kita biarkan muter ngurus ke koperasi, koperasi ngurus lagi, ya keburu layu kuenya gitu Pak.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Jadi tadi Pak Bambang yang saya maksudkan kalau kemudian ini secara regulasi ini bisa *bypass* hanya dengan Kemenperin yang baru misalnya kita munculkan, bagaimana supaya IKM ini bisa terbantu dengan 500 ribu ton tadi kalau kemudian nanti hasil kajian daripada 2 dirjen ini membutuhkan, cukup dengan Kemenperinlah misalnya begitu, dengan merujuk cantolannya adalah Undang-undang Cipta Kerja maka akan memudahkan. Jadi kita berikan waktu kalau saran saya kita berikan waktu kepada 2 dirjen ini untuk mengkaji secara regulasinya tapi tujuan kita adalah bagaimana ini barang bisa di *bypass*, kira-kira begitu.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, Pak Lamhot ntar kita masukkan di kesimpulan karena harus jelas jangan sampai kita hanya berdiskusi tapi tidak menjadi sebuah kesepakatan, ntar kita masukkan di kesimpulan.

Mungkin itu pertanyaan terakhir Bu, jadi Ibu bisa saya berikan kesempatan kepada Bu Dirjen dan yang mewakili Pak Putu, Pak Putu lagi ke, Pak Putu lagi makan ikan betutu, Pak Putu lagi ke Jepang ya Pak. Jadi kepada yang mewakili Pak Direktur, saya berikan kesempatan pendek-pendek aja Bu, singkat karena ntar jawabnya secara tertulis, kepada Bu Dirjen dan selanjutnya kepada Pak Dirjen Agro.

Waktu dan tempat kami persilahkan.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Menjawab apa yang sudah disampaikan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat, memang ada sebagian banyak memang akan kami jawab secara tertulis, terutama dari Pak Hendrik ya Pak ya, karena memang ini, paparan ini kami tidak menyampaikan capaian apa yang sudah kami raih tetapi ini lebih fokus kepada program pengembangan daya saing IKM dan sentra. Jadi kami memang menampilkan paparan seperti itu, namun untuk yang tadi ada beberapa yang *concern* terhadap persebaran sentra ada di *slide* 7. Jadi ini memang sudah ada dari Aceh sampai dengan Papua, jadi kembali lagi memang ketika jumlah pelaku IKM-nya banyak memang nanti signifikan terhadap jumlah sentranya seperti itu.

Kemudian kalau untuk yang program apa yang kami lakukan, terutama untuk pasar dan juga bagaimana menarik dari sisi kemasan, itu juga akan kami sudah *concern* disana. Walaupun memang kesannya programnya itu-itu saja, tetapi tiap tahun pasti ada prioritas dan juga ada pembaruan di dalam kegiatan ataupun program yang kami lakukan.

Khusus untuk topik kita kali ini, memang kami setuju sekali ketika memang gula rafinasi ini tidak, peruntukannya tidak hanya untuk industri besar tetapi juga untuk industri kecil dan menengah karena memang secara jenis usahanya adalah kegiatan industri. Namun memang, apa yang disampaikan Pak Lamhot tadi kami juga bisa menyarikannya bahwa memang ini ada Permendag 17 Tahun 2022 yang sudah mengatur sedemikian *rigid* bahwa untuk distribusi gula kristal rafinasi melalui distributor yang berbadan usaha koperasi. Jadi kami juga menyadari bahwa banyak mungkin sentra ataupun IKM yang tidak yang pengelolanya bukan koperasi, itu berarti dia tidak mendapatkan gula rafinasi ini. Jadi ini lah apa namanya kesannya kenapa sama-sama industri tetapi dia tidak dapat memanfaatkan fasilitas, sementara kalau untuk industri besar dan mendapatkan ini.

Untuk langkah selanjutnya kami juga ikut dengan teman-teman agro karena memang mungkin kami akan menyiapkan data yang lebih *valid* lagi, terutama untuk sentra ataupun IKM yang kegiatan usahanya adalah makanan minuman dengan bahan baku utamanya adalah gula rafinasi, karena memang di Undang-undang 3 Tahun 2014 juga diamanatkan kami harus memberikan kemudahan untuk bahan baku ataupun bahan penolong untuk kegiatan industri ini.

Mungkin itu Pak dari kami, sekali lagi atas masukan pertanyaannya kami sampaikan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik, jadi itu betul Bu Dirjen kan, ya mungkin dipisah aja kalau yang di sinikan industri yang nyantel ke koperasi, mungkin yang Bu Dirjen industri yang tidak ikut koperasi gitu.

Silakan Pak Direktur.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Jadi sejalan dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Pimpinan dan Pak Lamhot dan Pak Nasril tadi Pak tentang Permendag 17 ini sebenarnya kami di dalam paparan juga sudah mengusulkan Pak, kami juga mengusulkan kita memberi peran yang lebih kuat lagi kepada IKM *center*, nanti IKM *center* ini yang kita mintakan dari Kementerian Perindustrian dalam hal ini dari Dirjen IKMA untuk menyampaikan data-datanya Pak. Jadi kami sangat setuju sekali dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Lamhot, mungkin kita perlu kajian lebih dalam Pak ya untuk bagaimana kita membuat aturan atau kah cukup dengan Kemenperin ataupun dengan merevisi Permendag ini.

Mungkin itu Bapak Ketua yang bisa kami sampai dan untuk selanjutnya mungkin Pak Edi Direktur Industri Minuman akan menyampaikan.

Silakan.

DIREKTUR IMHTBP KEMENPERIN RI (EDY SUTOPO) :

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Pak Bambang Haryadi yang saya hormati.
Bapak/Ibu sekalian dari Komisi VII DPR RI.
Bu Dirjen dan Bapak/Ibu sekalian.

Mungkin saya ingin menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Emil dan yang pertama kami sangat setuju bahwa sebenarnya dulu sebelum Permendag yang baru ini nomor 22 tadi ya Pak, 17 dulu langsung Pak. Jadi dari koperasi kemudian langsung Kemenperin Pak, memang demikian yang dulunya Pak, karena memang intinya itu ketertelusuran Pak, kenapa industri besar bisa langsung karena memang dia bisa kontrak langsung, Pak. Jadi industri GKR ini yang menyalurkan gula kepada industri juga di audit. Untuk industri IKM sebenarnya kalau punya badan hukum, dia bisa apa namanya kontrak langsung, sebenarnya bisa Pak. Bagi mereka yang tidak bisa kontrak langsung itu ada apa lewat koperasi, kayaknya intinya tuh di ketertelusuran Pak. Jadi supaya bahwa GKR ini tidak merembes ke masyarakat, sebenarnya poinnya di sana.

Jadi saya kira barangkali, saya sepakat bahwa ini kita lihat dulu secara regulasi, apakah dari regulasi ada payung hukum mengenai Menkop ini. Setahu kami dulu kami ngurusin gula tuh di sekitar tahun 2010-2015 langsung itu Pak dulu Pak, lah makanya coba itu, jadi itu kami sepakat.

Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan tadi ada pertanyaan bahwa kenapa nih gula meningkat terus, kenapa kok petani juga tidak meningkat kesejahteraannya. Jadi kalau kita amati Pak, data PG tadi, PG-PG BUMN jumlahnya 43 sebagian besar berada di pulau Jawa, Pak. Jadi di pulau Jawa ini kalau kita lihat PG-PG BUMN itu rata-rata kapasitasnya tuh 3.800-an bahkan ada yang di bawah 2.000, 2.000 TCD dan itu mesinnya mohon maaf, itu mesinnya dari zaman Belanda, Pak. Jadi mesinnya tidak efisien, kapasitasnya kecil. Sementara kalau kita melihat *benchmark* dunia kapasitas industri gula di Brazil misalnya sebagai pengeksport gula dunia itu sekitar 10.000 TCD Pak, rata-rata di Brazil atau kalau kita lihat Thailand, Thailand itu lebih besar diantar sekitar 30.000 TCD sampai dengan 40.000 TCD. Jadi kalau Thailand itu strateginya dia mengambil kadar gula tertinggi karena kalau kita lihat kadar gula itu akan naik, nanti akan turun lagi. Jadi ketika pada musim kemarau itu nanti akan naik, kemudian pada saat curah hujan makin tinggi dia akan turun lagi. Di strategi di Thailand itu dengan kapasitas besar supaya dia bisa ngambil apa namanya *rendement* yang tertinggi.

Jadi barangkali itu kenapa petani tidak ikut meningkat kesejahteraannya karena di pulau Jawa ini terlalu banyak PG Pak, kalau tidak salah di pulau Jawa itu kurang lebih ada 50 PG. Sebenarnya menurut kajian yang pernah kami lakukan bersama dengan IPB dan para pakar praktisi, di Jawa itu idealnya sekitar 20-an PG, jadi dengan daya dukung tanaman yang ada itu 20 PG dengan kapasitas yang memadai, yang tadi sesuai dengan skala ekonomi internasional itu baru barangkali kita akan bisa carikan solusi permasalahan ini. Ini karena ... (*suara tidak jelas*)... nya kecil-kecil, mesinnya sangat tua, dia tidak efisien, ongkos produksinya sangat tinggi sehingga tidak mampu membeli tebu dengan harga yang memadai bagi petani.

Mungkin itu Pak sebagai tambahan, demikian.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi tadi saya garisbawahi perbedaan kenapa industri besar bisa, yang kecil enggak karena industri besar ada kepastian konsumsi ya kan, kepastian pembelinya, marketnya, yang IKM. Nah, ini kan sebenarnya soal teknis saja, IKM kan bisa penelusurannya bisa melalui Sis apa, 3 bulan penjualan atau 1 tahun lah audit gitu kan, berapa sih penjualan rata-rata kan, di situ kan bisa dihitung Pak, dari perpajakannya kan, sistem keuangannya itu bisa kelihatan juga Pak. Samalah kayak kita mau ngajuin kredit ke bank kan, nggak perlu mereka ngelihat itu penghasilannya berapa, tapi rata-rata yang mereka ini

perputaran uangnya berapa, itu nilai kredit yang akan diberikan, mereka tidak *rigid* siapa *customer*-nya nggak juga Pak, siapa yang gaji, berapa punya kos-kosan nggak, Bapak punya apartemen nggak. Mereka hanya melihat itu perputaran uang di rekeningnya berapa, PT itu kan, kayak keputusan ngajuan kredit kan ke bank mereka nggak jaminkan kontrak Pak, mereka hanya stabilitas keuangannya, perputaran keuangannya aja mereka bisa menilai, stabil nggak nih dengan 3 bulan jalan habis itu nggak ada lagi kan. Jadi minimal sudah berdiri setahun gitu kan, nggak boleh baru berdiri langsung, itu hanya soal teknis lah Pak.

Jadi saya pikir itu kita ingin mendorong bahwa keadilan itu harus tegak, keadilan harus sama di mata pembuat regulasi. Makanya kalau *enggak* adil maka nggak sejahtera kata Bang Tifatul. Jadi saya pikir itu, kita langsung ke.

F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):

Pimpinan, sebentar.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):

Izin interaktif langsung.

Pak izin mohon informasi, untuk proses gula GKR ini impor itu prosesnya gimana Pak ya, kalau impor, prosesnya gimana, GKR ini gimana mau impor kita karena GKR inikan lebih banyak impor, kalau nggak salah GKR ini lebih banyak impor karena domestik nggak bisa memenuhi ini. Setahu saya GKR ini banyak impor, mohon penjelasan Pak.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Terima kasih, Bapak.

Jadi untuk impor dari bahan baku gula rafinasi adalah *raw sugar* tadi Pak, yang kita atur melalui neraca komoditas. Jadi kemudian dari kita nanti kita atur, kita kumpulkan dalam neraca komoditas, berapa kebutuhan kita untuk perkiraan kebutuhan kita di tahun akan datang melalui neraca komoditas ini, sehingga bisa diputuskan di dalam Rakortas nanti di tingkat menteri berapa kebutuhan yang bisa kita impor untuk gula rafinasi ini, Pak.

F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):

Sebentar Pak Pimpinan, maksud saya misalnya saya, nih. Perusahaan X mau impor mekanismenya gimana Pak, itu maksud saya Pak.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Iya, mekanismenya itu tadi Pak, jadi Bapak pelaku usaha itu melakukan, meminta usulan kepada kepada KL teknis tadi melalui Sinas NK namanya Pak melalui sistem informasi tadi secara elektronik berapa kebutuhannya, nanti kebutuhannya ini yang akan kami verifikasi Pak, apakah benar kebutuhan yang dimintakan itu sesuai dengan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, itu nanti ya akan kita verifikasi nanti kebutuhan itu, Pak.

F-PD (DRS. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.):

Pimpinan, pertanyaan saya Pak, apakah selama ini Dirijen Agro melakukan evaluasi atau verifikasi yang rutin kepada para importir tersebut Pak, karena setahu saya para importir tersebut, contohnya misalnya Sinar Sosro atau Coca-Cola seperti itu, mereka kan punya kebutuhan *import* kan seperti itu. Maksud saya apakah kebutuhan-kebutuhan industri besar ini pernah dievaluasi, karena saya khawatir Pak, mereka *import* tapi kebutuhan sebagian impor itu mereka alokasikan ke tempat lain Pak, itu maksud saya, saya buka sedikit, kira-kira.

Terima kasih.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Terima kasih, Bapak.

Jadi perusahaan seperti Bapak sampaikan tadi sebenarnya mereka tidak mengimpor gula rafinasi Pak, mereka membeli dari gula rafinasi dari dalam negeri, Pak. Nah, ini kebutuhan mereka itu tadi dihitung oleh industri rafinasinya gitu.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ntar Pak Hendrik mendirikan pabrik gula rafinasi biar bisa mensuplai ke Coca-Cola. Baik, Pak Hendrik ya jadi ntar kita bantulah kalau Pak Hendrik mau mendirikan dan bikin pabrik pemurnian untuk gula rafinasi.

Baik untuk selanjutnya kita bacakan draf kesimpulan, coba, nggak kelihatan ya. Baik, saya bacain aja ya.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Pak Ketua, izin Pak Ketua. Jadi nggak dijawab.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya bacain draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian RI, Senin 26 Juni 2022.

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen IKMA dan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian RI untuk membuat regulasi guna mempermudah akses industri kecil menengah dalam mendapatkan gula kristal rafinasi dalam rangka penguatan daya saing IKM, khususnya makanan dan minuman dengan tetap memperketat sistem pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar pendistribusiannya tepat sasaran.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Izin Pimpinan, belum muncul di layar.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya makanya di *restart*, coba di *restart*, minta diganti tuh kayaknya, nggak harus dibaca dong.

Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Agro Kemenperin RI, Senin 26 Juni 2022.

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen IKMA dan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian RI untuk membuat regulasi guna mempermudah akses industri kecil dan menengah dalam mendapatkan gula kristal rafinasi dalam rangka peningkatan daya saing IKM, khususnya makanan dan minuman dengan tetap memperketat sistem pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar pendistribusiannya tepat sasaran.

Oke, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Agro Kemenperin RI untuk memberikan peran kepada IKM *center* sebagai lembaga penyedia bahan baku GKR kepada IKM khususnya apa ini, IKM lagi, IKM lagi, ketik dulu deh, GKR kepada IKM yang tidak gitu aja, IKM yang tidak menjadi ya gitu aja ya Bu ya, kepada IKM yang tidak menjadi anggota koperasi.

Setuju, coba Pak Lamhot mana, Pak Mukhtarudin dan Pak Pati Jaya perwakilan dari Kemenperin, setuju, Bu Dirjen setuju atau ada masukan silakan.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Sedikit Pak mengusulkan, mungkin tidak bukannya tidak menjadi anggota koperasi, mungkin yang tidak mempunyai akses langsung kepada GKR, Pak.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ada kewajiban nggak IKM itu wajib ikut koperasi?

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Kalau nggak ada kewajiban ya jangan, terkesan kita harus badan usaha itu harus menginduk ke koperasi.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Maksud saya itu tadi, yang tidak menjadi menjadi anggota koperasi, kita ganti dengan yang tidak mempunyai akses kepada GKR, Pak kepada industri GKR maksudnya, yang tidak bisa berkontrak langsung dengan industri GKR tadi, Pak.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Secara regulasi gimana Pak, ada dasarnya nggak Pak kalau dibikin seperti itu, sebagai lembaga penyedia bahan baku GKR, secara regulasi ada nggak. Kalau kita berani kita cantumkan simbol itu.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Saya pikir bukan di IKM *center*-lah, lebih baik Dinas Perindustrian.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Nggak ini Ketua, ini regulasi yang ada penyalur GKR di tingkat bawah itu selama ini koperasi. Selama ini di koperasi di *pool*-kan, itu pembelinya tuh boleh anggota koperasi juga boleh juga tidak anggota koperasi, tetapi penyalurnya adalah koperasi. Nah, kita minta kepada kementerian membuat regulasi baru, di samping koperasi boleh juga lembaga lain gitu, gitu ya Pak, boleh juga lembaga lain karena selama ini koperasi itu menjadi *bottleneck* Pak, IKM kita nggak perlu ada nggak. Di samping koperasi boleh disalurkan melalui lembaga lain, mereka membuat regulasi barunya gitu.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Perusda atau.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Bisa Perusda, bisa kelompok usaha apa ya kelompok usaha kecil yang lain lah gitu nanti aja.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Perwakilan pusat yang badan usaha lah, yang *scoop*-nya tingkat provinsi coba, ada nggak Pak Direktur, kayak di ini gitu lah kan, di Perhutani kan ada Inhutani gitu, Sanghyang Sri. Perindustrian punya nggak badan usaha begitu?

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Pimpinan kalau menurut saya kita bikin simpel aja bahwa kita menugaskan 2 dirjen ini untuk mencari skema baru yang intinya skema baru tersebut adalah bisa memudahkan, memotong mata rantailah gitu ya sehingga bisa *bypass*, mulai dari pelaku IKM-nya langsung ke Perindustrian gitu, itu aja, nanti mereka akan memberikan, melaporkan kepada kita skema barunya gitu. Apakah misalnya koperasi bisa, nonkoperasi bisa, nah itu termasuk semuanya gitu, silakan dikaji. Nah, bentuk usaha apa aja, apakah cukup dengan kepala dinas misalnya. Hal-hal seperti itu skema barunya intinya skema itu adalah merampingkan permohonan dari pelaku IKM-nya terhadap Perindustrian gitu. Nah nanti 2 Dirjen ini yang akan melaporkan kepada kita, skema barunya seperti apa gitu aja Pimpinan.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Kalau nggak samakan persis, hampir miriplah dengan yang industri besar aja, cuma karena IKM ini kan di bawah kecil-kecil. Jadi saya pikir IKM ini asal memenuhi ketentuan silakan mengajukan ke dinas, dinas melanjutkan ke dirjen sini melalui kan sama kan, atau melalui maminnya begitu. Kalau industri besar gimana coba, Pak.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Atau gini aja Ketua, senada dengan Pak Lamhot kita kan nggak bisa berandai-andai dulu nih, apakah ini, apakah ini. Jadi silakan mereka mengkaji dulu, kita kasih anu aja ke dalam kesimpulan memberi penugasan kepada 2 dirjen untuk melakukan pengkajian dan membuat skemanya seperti apa, dalam rangka agar IKM-IKM ini mendapat gula rafinasi yang lebih hemat, lebih cepat dan bisa sesuai dengan kebutuhannya.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Atau poin 2-nya kita hapus, jadi poin 1 aja.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Kajian aja dulu tapi kita tugaskan dia melaporkan ke kita, mungkin *nggak* secara regulasi, kalau regulasinya dasarnya ada, skemanya seperti apa tapi pengennya kita ada kemudahan, itu aja. Poinnya ada kemudahan bagi pelaku

IKM untuk mendapatkan akses gula ini, itu aja poinnya tinggal bagaimana caranya, Bapak kaji tapi tentu ada dasar hukumnya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Di samping Pak Mukhtar tadi, inikan persoalan sederhana aja *bottleneck* itu di Kementerian Koperasi Pak, karena koperasi yang meminta rekomendasi kepada Dinas Koperasi di daerah dilanjutkan terus ke Kementerian Koperasi. Nah, di Kementerian Koperasi ini perselingkuhan besar-besaran, kita mau mangkas di Kementerian Koperasi ini. Jadi dari Dinas Koperasi kabupaten kota ataupun provinsi langsung ke dirjen sini, nggak perlu lagi Kementerian Koperasi, ini *bottleneck* Pak, saya tahu persis Pak, udah *ngelotok* saya sudah, di *bypass* kemari, kenapa, neraca itu Bapak menentukan. Bapak tentukan 1 juta ton 1 tahun, nah Bapak menentukan berdasarkan rekomendasi yang ada dari daerah, silakan di evaluasi gitu, kita pangkas Kementerian Koperasi di sini.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kasih industri kecil itu kalau masih disuruh muter lagi, kita ingin memperpendek jalurnya.

Jadi mungkin begini, Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Agro untuk memberikan peran.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Mungkin mem-*bypass* Koperasi ini.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Memberikan peran kepada Dinas Industri di daerah dan Dinas Perindustrian di tingkatan daerah, baik tingkat satu atau tingkat 2 karena IKM itu adanya di provinsi, di tingkat 1 daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk mengusulkan langsung industri kecil IKM yang ingin mendapatkan GKR gitu ya, alokasi GKR, industri kecil menengah yang.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Untuk mengusulkan kebutuhan, untuk mengusulkan langsung kebutuhan GKR.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

IKM, IKM.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Para pelaku IKM kepada Kementerian Perindustrian, jadi gitu ininya, tapi gini Pak Ketua, ini kan, makanya ini perlu, kan ada dua kementerian yang dipangkas nih, Koperasi dan Perdagangan, ada di siklus yang tadi digambarkan Pak Direktur ini, ada.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Gini Bang, jadi intinya kesepakatan ini untuk jadi, ada saudara kita yang namanya IKM ini gara-gara Permendag ini, bukan terhalang sebenarnya tapi mereka alurnya jadi panjang. Jadi yang seharusnya mereka bisa mendapatkan, akhirnya tidak mendapatkan karena banyaknya permainan atau apapunlah karena semakin sedikit pintunya, kan ini tujuannya pintunya dipersedikitkan, konsepnya satu pintu, tapi banyak jendela gitu kan.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Artinya dari IKM langsung terhadap Perindustrian kan begitu, *bypass*-lah istilahnya gitu kan *bypass*. Nah ini yang kita minta tugaskan mereka 2 dirjen ini skemanya baru yang tujuannya *bypass* gitu.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bang Lamhot, yang poin 1 sudah kan. Pak Lamhot dibacakan ulang, silakan, sudah ada Pak lamhot.

Jadi yang poin 2 ini adalah mempertegas poin 1 aja gitu, ya Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Agro Kemenperin untuk memberikan peran kepada dinas, bukan untuk memberikan peran, untuk melibatkan ya kan, jangan memberikan peran kayak, untuk melibatkan Dinas Perindustrian baik tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk mengusulkan secara langsung industri kecil menengah yang ingin.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Bukan, mengusulkan secara langsung kebutuhan GKR-nya, bukan IKM-nya yang diusulkan secara langsung, kebutuhan GKR para pelaku IKM kepada Kementerian Perindustrian gitu.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ini tadi yang saya maksudkan butuh, harus ada butuh cantolan hukumnya nih ininya, boleh nggak.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Nah, itu cantolan hukumnya yang poin 1.

Jadi Pak Lamhot, di poin 1 itu kita minta Dirjen IKMA dan Dirjen Agro untuk merumuskan kan, membuat regulasi terkait akses untuk IKM ini untuk mendapatkan gula rafinasi.

Nah, poin ke-2-nya adalah teknis dari poin 1 bahwa tekniknya itu tidak boleh, jadi poin 1-nya itu udah langsung menuju ke poin 2 bahwa sistem pendistribusiannya melalui, pengusulannya *sorry*, pengusulannya melalui dinas bukan melalui Koperasi gitu, Dinas Perindustrian.

F-PG (Ir. LAMHOT SINAGA):

Poin 1 ini kajian regulasinya.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Ya, saya pikir Bu Dirjen sama Pak Dirut, tidak ada yang kita pangkas di sini. Peran Kementerian Perdagangan itu ada dalam di PKTN-nya perlindungan konsumen dan tertib niaga. Setelah kita berikan kepada penyalur di bawah mereka tinggal mengawasi, jadi kita yang pegang kendali sekarang Pak, bukan Menteri Perdagangan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Setuju ya yang kedua ya Bu Dirjen, Pak Direktur ada masukan.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Pak Direktur, yang selama ini kan yang mengatur kan Permendag ya, Permendag yang mengatur masalah ini kan selama ini. Nah, sekarang kan kita minta agar khusus IKM ini diatur tersendiri kan gitu melalui Perindustrian kan gitu maunya kita. Sekarang kan silakan berunding sesama pemerintah ini ya.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Poin ke-2.

Komisi VII sepakat dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Agro Kemenperin RI untuk melibatkan Dinas Perindustrian di tingkat daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk mengusulkan secara langsung kebutuhan GKR para pelaku UMKM kepada Kemenperin RI.

Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen IKMA Kemenperin RI untuk mengevaluasi sentra IKM kabupaten dan kota berdasarkan potensi yang dimiliki kabupaten kota tersebut.

Setuju, setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

4. Komisi VII DPRRI mendesak Dirjen IKMA dan Dirjen Agro Kemenperin RI untuk mendorong peningkatan peranan IKM guna mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri, mendorong peningkatan bukan bahan baku kalau IKM kan, kebutuhan dalam negeri gitu aja, pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Setuju ya, kebutuhan dalam negeri.

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VII DPRRI mengapresiasi Dirjen IKMA Kemenperin RI yang telah melakukan bimbingan teknis kepada pelaku IKM di daerah dan mendorong agar kuantitas dan kualitas bimbingan dengan teknik tersebut dapat ditingkatkan.

Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Terakhir, Komisi VII DPR RI meminta Dirjen IKMA dan Dirjen Agro Kemenperin RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII dan disampaikan paling lambat tanggal 4 Juli ke depannya, sekarang berapa 27 ya, oh boleh 4 Juli 2022.

Setuju?.

(RAPAT : SETUJU)

Baik Bu Dirjen Pak Dirjen atau yang mewakili, demikian rapat hari ini dan untuk menyingkat waktu kami berikan kepada Bu Dirjen untuk memberikan *closing statement* sebelum saya tutup rapat hari ini.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Yang terhormat Pak Bambang Haryadi Pimpinan Komisi VII dan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI yang terhormat.

Terima kasih atas masukan dan juga perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan kami, khususnya untuk pengembangan IKM dan juga sentra IKM dalam hal penyediaan bahan baku gula rafinasi untuk IKM dan sentra IKM makanan dan minuman. Harapan kami memang sesuai dengan apa yang diagendakan kita hari ini semua bisa berjalan mulus, apa yang kami lakukan juga bisa memberikan dorongan lebih kepada IKM dan sentra IKM makanan-minuman kita supaya lebih berdaya saing.

Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal paparan kami yang kurang berkenan, saya akhiri.

*Wabillahit Taufik walhidayah.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Perwakilan Dirjen Agro, silakan.

DIREKTUR IMHLP KEMENPERIN RI (EMIL SATRIA):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Terima kasih atas masukan dan arahan dari Bapak/Ibu sekalian, dan kami harapkan nanti peran kami di dalam pengembangan industri IKM, khususnya industri IKM untuk makanan dan minuman ini bisa lebih kuat dan lebih cukup besar lagi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F.P-GERINDRAWAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dirjen dan Pak Dirjen yang diwakili oleh 2 direktornya beserta seluruh jajarannya atas kerjasamanya yang baik dalam rapat dengar pendapat hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* rapat dengar pendapat hari ini saya nyatakan ditutup.

Wabillahittaufig wal hidayah.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DI TUTUP PUKUL. 16.25 WIB)

a.n. Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002